

PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM TERHADAP KINERJA

BANK BUMN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi Ekonomi Pembangunan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Shinta Rahmadani
NPM : 1805180008
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Srata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama Lengkap : SHINTA RAHMADANI
NPM : 1805180008
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : RISET EKONOMI DAN BISNIS
Judul Skripsi : PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM TERHADAP
KINERJA BANK BUMN DI INDONESIA

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dra. ROSWITA HAFNI M.Si)

Penguji II

(SRI ENDANG RAHAYU, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Dr. PRAWIDYA HARIANI S.E, M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SHINTA RAHMADANI
NPM : 1805180008
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : RISET EKONOMI DAN BISNIS
Judul Skripsi : PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM TERHADAP
KINERJA BANK BUMN DI INDONESIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2022

Dr. Pembimbing Skripsi

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Dr. Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : SHINTA RAHMADANI
N P M : 1805180008
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset Ekonomi Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen kelengkapan administrasi yang saya yang berjudul **"Pengaruh Transformasi Digital Sistem Terhadap Kinerja Bank Bumn Di Indonesia"** adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Medan, September 2022
Yang Menyatakan



(SHINTA RAHMADANI)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Pengaruh Transformasi Digital Sistem Terhadap Kinerja Bank BUMN Di

Indonesia

Shinta Rahmadani

1805180008

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: shintarahmadani565@gmail.com

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum baik yang bersifat nasional maupun internasional, ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan oleh salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di sebuah negara termasuk Indonesia. Masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya. Antara lain, karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan. OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif. Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012, salah satu program di antaranya adalah *Branchless Banking*. *Branchless Banking*. Potensi ekonomi digital RI yang kian tumbuh. Menurut Bain, Google, dan Temasek (2020), Indonesia berpeluang menjadi negara dengan perkembangan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. OJK menjelaskan, digitalisasi perbankan di Indonesia juga didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan penggunaan gawai di masyarakat yang memungkinkan semakin banyak masyarakat mengakses aplikasi daring dalam sehari-hari.

Kata kunci : Bank, Kinerja Bank, *Branchless Banking*

ABSTRACT

The Effect of System Digital Transformation on the Performance of State-Owned Banks in Indonesia

Shinta Rahmadani

1805180008

Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business

Muhammadiyah University of North Sumatra

Email: shintarahmadani565@gmail.com

The business world is the world that is most discussed in various forums both nationally and internationally, the crowded discussion on this issue is caused by one of the benchmarks of a country's progress is from its economic progress and the backbone of economic progress is the business world. The Bank is one of the financial institutions that plays an important role in the economy in a country including Indonesia. There are still many members of the public who do not know, use or get banking services and other financial services. Among other things, due to residing in a location far from the bank office or the presence of burdensome fees or requirements. FSA. Banking industry, and other financial services industries are committed to supporting the realization of financial inclusion. The Government of Indonesia launched the National Financial Inclusion Strategy (SNKI) program in June 2012, one of which is Branchless Banking. Branchless Banking. The potential of Indonesia's digital economy is growing. According to Bain, Google, and Temasek (2020), Indonesia has the opportunity to become the country with the largest digital economy development in the Southeast Asian region. OJK explained that the digitalization of banking in Indonesia is also driven by an increase in internet penetration and the use of gadgets in the community which allows more and more people to access online applications on a daily basis.

Keywords : Bank, Bank Performance, Branchless Banking

KATA PENGANTAR



Asaalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, kesabaran, serta kekuatan dan tak lupa pula Shalawat bernadakan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: **“PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM TERHADAP KINERJA BANK BUMN DI INDONESIA”**, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penelitian skripsi ini penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh penulis, namun demikian penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas sehingga terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah membimbing penulis, baik moril, materil dan ide-ide pemikiran.

Skripsi ini dipersembahkan terkhusus kepada Kedua Orang tua saya Ibu Mulia Ningsih dan Bapak Mairizal yang telah memberikan do'a, spiritual, moral, dan materil yang tidak akan ternilai. Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
4. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Seluruh dosen mata kuliah Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan hormati, dan juga kepada adik-adik saya Panji, Deby dan Hasbie serta Eyang saya yang saya sayangi dan cintai
7. Kepada teman kampus saya yang telah saling membantu dan saling support baik dalam kehidupan kampus maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman Program Studi Ekonomi Pembangunan saya yang telah memberi semangat dan motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah menjadi wadah berproses dalam belajar berorganisasi.

10. Kepada seluruh keluarga besar Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU dari angkatan 2017 – 2020

11. Seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu demi satu.

Seluruh bantuan yang tidak ternilai harganya ini tidak dapat saya balas satu per satu, semoga Allah SWT membalasnya sebagai amal ibadah dan akan menjadi manfaat yang sangat besar bagi kita semua, Amin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 13 September 2022
Penulis,

SHINTA RAHMADANI

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	14
1.4 Tujuan Masalah	15
1.5 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1. Uang dan Lembaga Keuangan.....	16
2.1.2. Teori Permintaan Uang	30
2.1.3. Kebijakan Moneter.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu	39
2.3 Regulasi.....	40
2.3.1 <i>Branchless Banking</i>	40
2.3.2 Makroprudnsial dan Mikroprudensial	44
2.3.3 Kineja Bank	54
2.4 Kerangka Penellitian.....	69
2.5 Hipotesaa.....	60
BAB III METODE PENELITIAN	61
3.1 Pendekatan dan Metode Peneltian.....	61
3.2 Definisi Operasional	61
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	62
3.4. Populasi Dan Sampel.....	62
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	62
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.7 Teknik Analisis Data	63

3.8. Analisis Model Ekonometrika Penelitian	63
3.9. Uji Asumsi Klasik	65
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	68
4.1 Gambaran Kinerja Bank	68
4.2 Analisis Pngaruhbranchless Bnking Terhadap Kinerja Bank BUMN.....	72
4.3 Hasil Analisis Kinerja.....	84
4.4 Uji Saatistik.....	85
4.5 Uji Asumsi Kasik	86
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Aktivitas Ekonomi dengan Adanya Lembaga Keuangan.....	5
Gambar 1.2 Total Kantor Cabang Bank Umum.....	10
Gambar 1.3 Pengguna Layanan Perbankan Digital Selama Covid-19.....	10
Gambar 1.4 Transaksi Digital Banking, Jumlah kantor dll.	11
Gambar 2.4. Kerangka Penelitian	59
Gambar 2.5. Kerangka Konseptual	59
Gambar 3.1 Grafik =Kriteria Uji.....	67
Gambar 4.1 Kinerja ROA BRI.....	72
Gambar 4.2 Kinerja ROA Mandiri.....	72
Gambar 4.3 Kinerja ROA BTN	73
Gambar 4.4 Kinerja ROA BNI	74
Gambar 4.5 Kinerja BOPO BRI	74
Gambar 4.6 Kinerja BOPO Mandiri	75
Gambar 4.7 Kinerja BOPO BTN	76
Gambar 4.8 Kinerja BOPO BNI	76
Gambar 4.9 Kinerja NIM BRI	77
Gambar 4.10 Kinerja NIM Mandiri	78
Gambar 4.11 Kinerja NIM BTN.....	78
Gambar 4.12 Kinerja NIM BNI	79
Gambar 4.13 Kinerja LDR BRI.....	79
Gambar 4.14 Kinerja LDR Mandiri	80
Gambar 4.15 Kinerja LDR BTN.....	80
Gambar 4.16 Kinerja LDR BNI.....	81
Gambar 4.17 Kinerja CAR BRI	81
Gambar 4.18 Kinerja CAR Mandiri	82
Gambar 4.19 Kinerja CAR BTN	82
Gambar 4.20 Kinerja CAR BNI.....	83
Gambar 4.21 Hasil Regresi Variabel CAR.....	83
Gambar 4.21 Hasil Regresi Multikolinieritas	83
Gambar 4.23 Hasil Regresi Heteroskedestisitas	85

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kinerja ROA	68
Tabel 4.2 Kinerja NIM.....	69
Tabel 4.3 Kinerja BOPO	69
Tabel 4.4 Kinerja LDR	70
Tabel 4.5 Kinerja CAR	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang dipakai dalam aktivitas ekonomi. Nilai tukar uang ditentukan dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada zaman dahulu, masyarakat belum menggunakan uang untuk alat tukar. Sebagai gantinya, mereka memakai sistem barter barang. Sistem barter barang tersebut memang bertahan cukup lama dalam kehidupan masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia. Akan tetapi, semakin majunya sebuah peradaban, sistem tersebut perlahan tergantikan dengan metode lain. Sejarah uang bisa dilacak pada periode waktu 1.200 sebelum Masehi (SM). Menurut *Britanica*, beberapa mata uang paling awal adalah benda-benda dari alam. Contohnya adalah cangkang cowrie. Penggunaan pertama cowrie, cangkang moluska yang banyak tersedia di perairan dangkal Samudra Pasifik dan Hindia, adalah di Cina. Secara historis, banyak masyarakat tradisional di Cina telah menggunakan cowrie sebagai uang, dan bahkan cowrie telah digunakan di beberapa bagian Afrika. Cowrie merupakan mata uang yang paling banyak digunakan dan paling lama digunakan dalam sejarah. Selama ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Eropa untuk memperluas jalur perdagangan, beberapa kali ditemukan kalau cangkang kerang tersebut digunakan sebagai alat tukar. Di belahan dunia lain, sejarah uang juga dapat diketahui. Misalnya, mata uang lain dari alam adalah gigi paus, yang digunakan oleh masyarakat Fiji. Sepanjang sejarah uang, ada banyak koin berbeda yang digunakan di berbagai belahan dunia.

Contohnya sekitar tahun 500 SM, koin putaran pertama dibuat dan dicap dengan simbol dewa serta kaisar untuk keasliannya. Lalu ada pula sen perak, yang merupakan koin standar di Eropa Barat dari 794 hingga 1200 M. Sementara itu, dikutip dari *The Conversation*, percetakan koin paling awal yang diketahui berasal dari tahun 650 dan 600 SM di Asia Kecil. Saat itu ditemukan fakta bahwa koin perak dan emas yang dicap, digunakan untuk membayar tentara. Melansir dari *Investopedia*, pada awal Agustus 2021, para arkeolog Tiongkok dari Universitas Negeri Zhengzhou mengumumkan bahwa mereka telah menemukan situs pencetakan koin tertua di dunia. Fasilitas itu mulai beroperasi tahun 640 SM dan mulai membuat koin spade. Koin logam standar pertama. Dalam sejumlah literatur, sekitar 5.000 tahun yang lalu orang-orang Mesopotamia menciptakan syikal, yang dianggap sebagai bentuk mata uang pertama yang diketahui. Selain itu, ada masyarakat di sebuah pulau di sekitar Mikronesia, yang mengukir cakram batu kapur besar untuk menjadi mata uang, dan tetap menjadi bagian dari budaya pulau itu hingga sekarang. Uang koin yang digunakan itu perlahan bergeser pada uang kertas, karena dianggap lebih mudah dicetak dan dipakai sebagai alat tukar. Sekitar 700 M, Kekaisaran Cina mulai berpindah dari koin ke uang kertas. Sedangkan beberapa bagian Eropa masih menggunakan koin logam sebagai satu-satunya bentuk mata uang mereka hingga abad ke-16. Hal tersebut disebabkan karena ekspedisi yang dilakukan serta penaklukan Eropa pada wilayah jajahannya. Wilayah tersebut menyediakan sumber baru dan logam mulia, sehingga memungkinkan negara-negara Eropa untuk terus mencetak koin logam yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu negara-negara Eropa kemudian mulai mencetak uang kertas. Misalnya Pada 1685, saat Kanada

masih menjadi koloni Prancis. Saat itu para tentara diberikan kartu remi dalam denominasi dan ditandatangani oleh gubernur, untuk digunakan sebagai uang tunai, bukan koin dari Prancis. Negara-negara di Eropa perlahan beralih ke uang kertas. Masih mengutip dari Investopedia, pencetakan uang kertas pada masa lalu sering digunakan sebagai deposit dan pinjaman untuk dibawa menggantikan koin logam. Uang kertas ini dapat dibawa ke bank kapan saja dan ditukarkan dengan nilai nominalnya. Tidak hanya itu, uang kertas tersebut bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa. Saat itu uang kertas dikeluarkan oleh bank dan lembaga swasta. Namun saat ini bank sentral negara lah yang sekarang bertanggung jawab untuk menerbitkan mata uang. Setiap negara di dunia mempunyai mata uang sendiri yang digunakan sebagai alat tukar. Besar-kecilnya Nilai tukar mata uang ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, misalnya kondisi politik suatu negara, konflik antar dua negara, dan sebagainya. Contoh paling baru misalnya seperti konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, yang berdampak pada nilai tukar mata uang. Akibat invasi yang dilakukan oleh Rusia, mata uang negara tersebut yaitu rubel sempat anjlok. Berdasarkan data *Yahoo Finance*, rubel ditransaksikan melemah 10,98 per dolar AS atau 13,93% ke level 89,79 per dolar AS pada perdagangan Kamis, 24 Februari 2022, hingga pukul 12.30 WIB. Di Indonesia mata uang yang dipakai adalah rupiah (Rp). Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, sampai dengan pemusnahan. Selain mata uang, proses transaksi menggunakan uang pun mengalami perubahan. Di era digital, masyarakat dapat

melakukan transaksi ekonomi secara teratur melalui perangkat elektronik, tanpa pertukaran uang fisik apa pun. Hal ini akan menjadi bagian penting dari perkembangan sejarah uang kedepannya. (<https://databoks.katadata.co.id/>)

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum baik yang bersifat nasional maupun internasional, ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan oleh salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Masyarakat dan perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis dalam berbagai bidang usaha mulai dari usaha perdagangan industri pertanian manufaktur peternakan dan sebagainya. Masalah pokok dan paling sering dihadapi oleh setiap pelaku bisnis yang bergerak dalam bidang usaha apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana ataupun modal untuk membiayai usahanya, kebutuhan akan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerjausaha keuangan dilaksanakan oleh karena itu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan adalah solusi atas masalah tersebut. Bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan industri/usaha sangat membutuhkan jasa Bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya. Bila tanpa kehadiran Bank dan lembaga keuangan, aktivitas ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut. Sektor Industri menghasilkan barang atau jasa yang akan dikonsumsi sektor rumah tangga dengan menukarnya dengan uang yang dimilikinya. Transaksi ini terjadi di pasar komoditi. Sementara itu sebagai sumber daya, sektor rumah tangga akan menawarkan SDM-nya kepada

sektor industri yang akan membayarnya dengan upah/gaji, atau bentuk kompensasi lainnya. Transaksi ini terjadi di pasar sumber daya. Dalam masyarakat sederhana, aktivitas seperti gambar. di atas tidak adanya peran Bank dan lembaga keuangan, mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun dalam masyarakat yang semakin berkembang saat ini, peran Bank dan lembaga keuangan lainnya sangatlah penting, khususnya sebagai lembaga mediasi antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Mekanisme aktivitas ekonomi masyarakat modern dengan peran bank dan lembaga keuangan lain, dapat dilihat dalam gambar berikut ini. (<https://www.studocu.com>)

Gambar 1.1 Aktivitas Ekonomi dengan Adanya Lembaga Keuangan



Sumber : Studocu, Bahan Kuliah Ekonomi Moneter, Aris B Setiawan

Secara umum dapat dikatakan, bahwa seperti terlihat pada gambar di atas, Bank dan lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sektor industri, khususnya di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada sektor industri sebagai kredit investasi. Meskipun dalam prakteknya penyerapan dan penyaluran dana itu sendiri dapat terjadi baik di dan untuk sektor rumah tangga maupun sektor industry. Dalam

praktiknya lembaga keuangan bank terdiri dari Bank sentral, Bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan memegang fungsi sebagai bank sirkulasi Bank to bank dan lender of the last resort kemudian bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan di kelompokkan ke dalam dua jenis yaitu Bank devisa dan Bank umum Non Devisa. Bank umum yang berstatus Devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus Non Devisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan BPR berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bang Pegawai dan Bank lainnya yang kemudian menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Fungsi dan peranan lembaga keuangan terutama bank adalah sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, bagi masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro tabungan deposito atau bentuk simpanan lainnya begitu pula masyarakat yang kekurangan dana dapat meminjamkan uang di lembaga-lembaga keuangan dalam bentuk kredit. Secara umum dapat dikatakan, bahwa Bank dan lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sektor industri, khususnya di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada sektor industri sebagai kredit investasi. Meskipun dalam prakteknya penyerapan dan penyaluran

dana itu sendiri dapat terjadi baik di dan untuk sektor rumah tangga maupun sektor industri. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan menurut Undang–Undang No.14 / 1967 Pasal 1 ialah, Semua badan yang melalui kegiatan kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. (<https://www.studocu.com>)

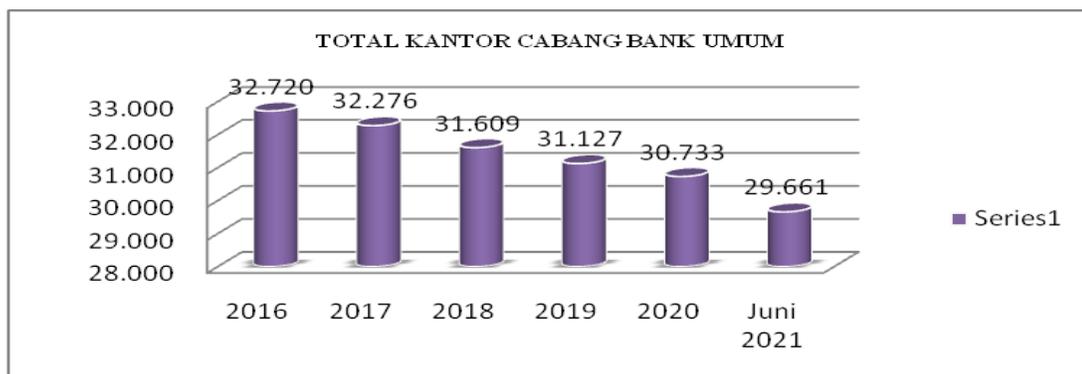
Menurut Undang-undang, jenis bank hanya terbagi menjadi tiga berdasarkan fungsinya yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Namun, pada praktiknya, kita juga dapat mengelompokkan bank berdasarkan operasionalnya yaitu Konvensional dan Syariah. Bank Konvensional ialah yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dengan metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga bunga yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BTN dan sebagainya. Sedangkan Bank Syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan usaha menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Peraturan tentang Bank Syariah sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Contohnya seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Bri Syariah yang kemudian menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia yang merupakan entitas gabungan dari ke 3 bank syariah tersebut. Dan bank berdasarkan kepemilikannya yaitu Pemerintah, Swasta, Asing, dan Campuran dan statusnya Devisa dan Nondevisa. (<https://www.cnbcindonesia.com>)

Masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya. Antara lain, karena

bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan. OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif. Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012, salah satu program di antaranya adalah *Branchless Banking*. *Branchless Banking* yang ada sekarang perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Selain itu, juga melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota. Dunia industri sedang memasuki era baru yang disebut dengan Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah “cyber physical system”. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi yang dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Sehingga, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya akan bertambah. Sejalan dengan pergeseran pertumbuhan industri ke arah digital, berbagai kegiatan mulai beralih mengikuti perkembangan yang ada. Inovasi teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan juga merambah ke dunia finansial. Salah satu bidang yang menuju pergeseran era industri 4.0 terjadi pada bidang perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong digitalisasi perbankan dengan mengeluarkan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan

Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, peraturan yang dikeluarkan oleh OJK ini menyebutkan “layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah dan sesuai dengan kebutuhan (customer experience) serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan”. Dengan adanya peraturan dari OJK ini diharapkan perbankan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Transformasi digital yang dilakukan industri perbankan lebih dari sekedar menyediakan layanan online dan mobile banking. Industri finansial perbankan perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah, dalam hal ini temuan-temuan teknologi baru tersebut harus mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses layanan perbankan. Mengacu pada data Inventure (2020), yang dikutip dalam buku Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diterbitkan merupakan suatu kerangka acuan yang terperinci sebagai landasan dalam perencanaan dan penyusunan program-program pengembangan sumber daya manusia di sector jasa keuangan, salah satu dampak yang terlihat adalah perubahan transaksi perbankan selama pandemi. Transaksi-transaksi yang awalnya banyak dilakukan di kantor cabang saat ini dilakukan secara digital atau online melalui mobile banking, internet banking, ataupun call center yang digerakkan oleh artificial intelligence. Seiring dengan itu, terdapat tren bank yang terus menutup jaringan kantornya. (<https://www.cnbcindonesia.com>)

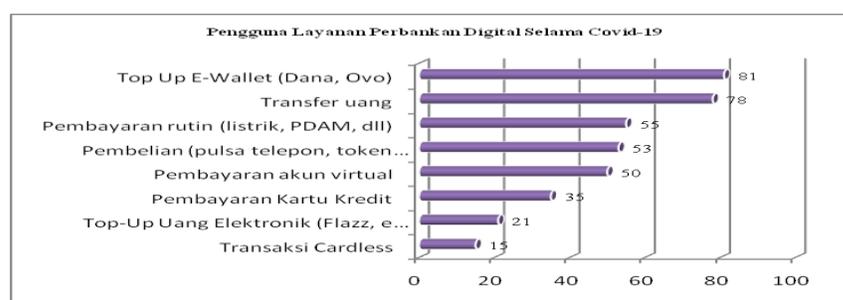
Gambar 1.2 Total Kantor Cabang Bank Umum



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (2021)

Kemudian, pagebluk juga mendorong konsumen mengurangi transaksi tunai (cash). Menurut catatan OJK, sebelum pandemi, tren transaksi ke arah cashless transaction atau transaksi non-tunai ini memang sudah meningkat. Akan tetapi pandemi Covid-19 mempercepat proses tersebut dengan alasan untuk mengurangi potensi penularan virus. Ini terlihat dari tren peningkatan penggunaan layanan perbankan digital selama pandemi Covid-19. (<https://www.cnbcindonesia.com>)

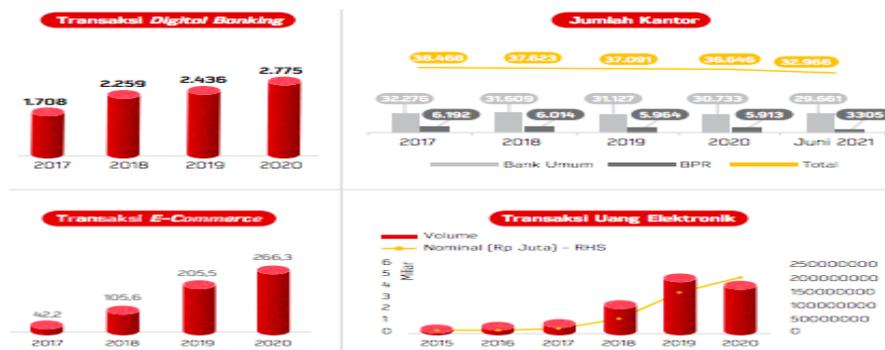
Gambar 1.3 Pengguna Layanan Perbankan Digital Selama Covid-19



Potensi ekonomi digital RI yang kian tumbuh. Menurut Bain, Google, dan Temasek (2020), Indonesia berpeluang menjadi negara dengan perkembangan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nilai transaksi ekonomi digital

Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN, yakni mencapai US\$44 miliar. Nilai ekonomi digital RI diprediksi akan mencapai US\$124 miliar pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan, gelombang digitalisasi terus berkembang di RI yang tercermin dari semakin tingginya tingkat pemanfaatan dan penggunaan internet. OJK mencatat, potensi ini merupakan peluang yang menjanjikan bagi para pelaku bisnis digital untuk menciptakan produk dan layanan berbasis teknologi informasi. Namun populasi masyarakat yang belum punya rekening bank (unbanked) yang masih tinggi. Berdasarkan hasil riset Bain, Google, dan Temasek (2019), sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki rekening di bank dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan (underbanked) dengan jumlah masing-masing mencapai 92 juta jiwa dan 47 juta jiwa. (<https://www.cnbcindonesia.com>)

Gambar 1.3 Transaksi Digital Banking, Jumlah Kantor, Transaksi *E-commerce* dan transaksi Uang Elektronik Tahun 2017-2020



Sumber :CNBC Indonesia, 2021

OJK menjelaskan, digitalisasi perbankan di Indonesia juga didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan penggunaan gawai di masyarakat yang memungkinkan semakin banyak masyarakat mengakses aplikasi daring dalam sehari-

hari, seperti aplikasi bertukar pesan (chatting), media sosial, aplikasi belanja online (shopping apps), hingga aplikasi perbankan (banking apps). Mengacu pada data We Are Social dan Hootsuite (2021), sebagian besar pengguna internet berusia antara 16 hingga 64 tahun mengakses aplikasi chatting, media sosial, dan aplikasi belanja online dengan persentase di atas 90%. Sementara, penggunaan banking apps baru sebesar 39,2%. Kendati demikian, angka ini meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar 33% peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengguna internet yang mulai beralih menggunakan banking apps dalam bertransaksi keuangan. Berkaitan dengan itu, potensi digital perilaku digital masyarakat turut mendorong peningkatan tren yang tercermin dari tren kenaikan transaksi e-commerce (e-niaga), digital banking, dan uang elektronik dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. (<https://www.cnbcindonesia.com>)

Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut dapat dilihat bahwa teknologi digital sistem yang dilakukan oleh tiap bank memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap kinerja bank ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Teknologi Digital Sistem Terhadap Kinerja Bank BUMNN Di Indonesia”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka identifikasi masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong digitalisasi perbankan dengan mengeluarkan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.
2. Menurut catatan OJK, sebelum pandemi, tren transaksi ke arah cashless transaction atau transaksi non-tunai sudah meningkat dan pandemi mempercepat proses cashless.
3. Gelombang digitalisasi terus berkembang di RI yang tercermin dari semakin tingginya tingkat pemanfaatan dan penggunaan internet.
4. Berdasarkan hasil riset Bain, Google, dan Temasek (2019), sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki rekening di bank dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan (underbanked) dengan jumlah masing-masing mencapai 92 juta jiwa dan 47 juta jiwa.
5. Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012, salah satu program di antaranya adalah Branchless Banking.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka penelitian ini dibatasi hanya pada pengaruh perkembangan teknologi sistem terhadap kinerja Bank konvensional yang di miliki oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2012-2021

1.3.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan kinerja Bank Konvensional milik Pemerintah Indonesia pasca kebijakan *Branchless Banking*?
2. Bagaimana kinerja CAR Bank Konvensional Milik Pemerintah Indonesia pada era teknologi digital sistem?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif perkembangan kinerja Bank Konvensional milik Pemerintah Indonesia pasca kebijakan *Branchless Banking*
2. Melakukan estimasi CAR Bank Konvensional Milik Pemerintah Indonesia pada era teknologi digital sistem 2012-2021

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia sektor perbankan di Indonesia. Manfaat yang dapat diambil diantaranya.

1.5.1 Manfaat Akademik

Bagi Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara

1. Sebagai bahan studi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topic yang sama.
2. Sebagai bahan tambahan literature terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia.
3. Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikandan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
4. Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

1.5.2 Manfaat Non Akademik

1. Sebagai bahan masukan bagi Bank BUMN untuk dapat meningkatkan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
2. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi Pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Uang dan Lembaga Keuangan

a. Uang

Uang adalah seperti yang kita bayangkan, yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai:

- (1) Alat tukar (*medium of exchange*)
- (2) Alat penyimpan nilai (*store of value*),
- (3) Satuan hitung (*unit of account*), dan
- (4) Ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*).

Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun daripada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat keadaan kambing dalam lima tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing semula. Sekilas Perkembangan Penggunaan Uang. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, uang mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami perubahan dan perkembangan sepanjang peradaban manusia. Pada

awalnya, masyarakat primitif yang hidup berkelompok dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri (*self sufficient*) belum mengenal atau membutuhkan benda yang namanya uang (misalnya sebagai alat penukar). Dalam perkembangan selanjutnya, setelah suatu kelompok masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain dan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri timbulah kebutuhan untuk melakukan pertukaran antarindividu atau antarkelompok masyarakat tersebut. pertukaran atau transaksi antarindividu atau antarkelompok masyarakat tersebut pada awalnya dilakukan dengan cara menukarkan barang yang satu dengan barang yang lain. Sistem pertukaran barang dengan barang tersebut dikenal dengan istilah sistem barter. Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem barter harus dipenuhi kondisi yang disebut kebetulan ganda (*double coincidence*). Apa yang dimaksud dengan kebetulan ganda? Kebetulan yang pertama adalah bahwa seseorang bertemu dengan orang lain yang akan menukarkan barangnya dan kebetulan yang kedua adalah bahwa barang tersebut adalah barang yang saling dibutuhkan. Dengan demikian, dalam sistem barter, semua barang harus dapat diukur dengan seluruh atau sebagian barang lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dengan semakin kompleksnya kehidupan ekonomi suatu masyarakat, kebetulan ganda tersebut akan semakin sulit ditemukan. Karena kondisi yang demikian, secara bertahap timbulah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar untuk mempermudah tukar-menukar atau perdagangan antarindividu dan antarkelompok masyarakat. Penggunaan benda-benda sebagai alat penukar (yang selanjutnya disebut sebagai uang) semula hanya didasarkan pada kesepakatan di antarmasyarakat yang mempergunakan. Suatu benda hanya dapat

dipergunakan sebagai alat tukar setelah disepakati secara umum oleh masyarakat yang bersangkutan, yakni, hampir setiap orang harus mau menerima benda tersebut untuk membayar barang-barang yang diperdagangkan. Proses tersebut berlangsung secara bertahap dan sangat lama. Telah berabad-abad berbagai benda dikembangkan sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran untuk dapat dipergunakan dalam perdagangan. Benda tersebut dapat berupa kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Benda yang dipergunakan dan diterima sebagai alat pembayaran dalam sistem perekonomian yang sangat sederhana tersebut pada umumnya adalah benda yang dianggap berharga dan seringkali juga yang mempunyai kegunaan untuk dikonsumsi atau keperluan produksi. Benda yang dipergunakan sebagai uang tersebut pada umumnya juga mudah dibawa dan tidak mudah rusak atau tahan lama. (Ardansyah Putra Harahap dan Dwi Saraswati, 2020)

Dalam perkembangan selanjutnya hubungan dan interaksi antara kelompok masyarakat, terutama hubungan perdagangan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat, semakin meluas. Untuk memperlancar transaksi pertukaran dan jual-beli tersebut semakin dirasakan perlunya benda tertentu yang dapat digunakan secara praktis sebagai pengganti uang. Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam berharga dan kertas sebagai uang. Sebelum digunakannya kertas sebagai uang, logam berharga dikenal sebagai bentuk uang yang paling populer karena memiliki ciri-ciri yang pantas dikehendaki sebagai uang, yaitu dapat dipecah-pecah dan dinyatakan dalam unit-unit kecil sehingga dapat

dipergunakan untuk melakukan transaksi dengan mudah. Selain itu, uang logam mudah dibawa, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Berkaitan dengan penggunaan logam sebagai uang, telah dikenal uang logam emas dan perak sebagai alat tukar yang banyak dipakai. Penggunaan logam mulia tersebut sebagai alat pembayaran ternyata mengalami pasang-surut, antara lain sebagai akibat terbatasnya ketersediaan dan/atau mahalnyabiaya penambangan logam tersebut. Dalam perkembangannya, penggunaan logam-logam berharga tersebut meLDRbulkan permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya untuk transaksi yang berjumlah besar, karena selain oleh adanya kesulitan dan biaya pengangkutan, risiko mungkin akan timbul, misalnya perampokan. Untuk mengatasi hal ini, lembaga-lembaga swasta atau pemerintah mulai menyimpan sertifikat-sertifikat berharga yang mewakili logam tersebut. Pada awal penggunaannya, sertifikat tersebut didukung sepenuhnya oleh nilai logam yang disimpan di tempat penyimpanan atau yang dikenal sebagai bank. Setelah beberapa waktu digunakan dan diterima secara luas, sertifikat tersebut tidak bergantung secara penuh pada dukungan logam dengan nilai penuh, misalnya hanya didukung 40% oleh simpanan emas. Dengan demikian, nilai yang tercantum pada sertifikat yang bersangkutan (nilai nominal) tidak sama dengan nilai jaminan fisik logam yang disimpan (nilai intrinsik). Apabila nilai nominal suatu mata uang lebih besar dibandingkan dengan nilai intrinsiknya, uang tersebut dikenal dengan uang fiat. Dalam hal ini uang diakui sebagai tanda setuju. Termasuk di antara uang fiat adalah uang kertas yang kita kenal selama ini. (Ardansyah Putra Harahap dan Dwi Saraswati, 2020)

Dalam perkembangannya, penggunaan uang tidak tunai dalam transaksi ekonomi sudah dikenal secara terbatas pada abad ke-18, pada saat dimulainya evolusi sistem perbankan moderen. Sejalan dengan evolusi sistem perbankan tersebut, proses giralisasi, yaitu penyim-panan uang dalam bentuk rekening giro (*demand deposit*) baru dikenal secara luas pada awal pertengahan abad ke-20. Dalam pada itu, masyarakat mempunyai keleluasaan untuk menggunakan baik warkat perintah penarikan maupun cek untuk melakukan transaksi. Dalam perkembangannya, simpanan giro begitu populer sehingga jumlahnya melebihi jumlah uang kertas dan logam yang digunakan pada waktu itu. Sejalan dengan perkembangan tersebut, simpanan tabungan (*savings deposit*) juga mulai dikenal. Bahkan, pada tahun 1950-an, perubahan praktik perbankan telah mendorong semakin besarnya jumlah simpanan tabungan dibandingkan dengan simpanan giro. Perkembangan dan inovasi sistem perbankan yang pesat selanjutnya mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek. Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan “uang elektronik” (*electronic money atau E-money*), seperti internet banking, *debit cards*, dan *automatic teller machine (ATM) cards*. Evolusi uang tidak berhenti di sini. “Uang elektronik” juga muncul dalam bentuk smart cards, yaitu penggunaan chips pada sebuah kartu. Penggunaan *smart cards* sangat praktis, yaitu dengan “mengisi”

chips dengan sejumlah uang tertentu yang dikehendaki, dan selanjutnya menggunakannya untuk melakukan transaksi. (Ardansyah Putra Harahap dan Dwi Saraswati, 2020)

b. Lembaga Keuangan

Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah *"setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan menghimpun dana menyalurkan dana atau kedua-duanya"* artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan apakah kegiatan yang hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana (Kasmir, 2014). Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu: Pertama lembaga keuangan bank dan kedua lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan. Dasar Hukum Lembaga Keuangan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian bank adalah sebagai berikut, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Meskipun dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak membatasi kegiatan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan lembaga keuangan

bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa (Ardansyah Putra Harahap dan Dwi Saraswati, 2020)

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di sebuah negara termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran bank adalah suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*). Bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit usaha kepada dunia usaha akan membantu dunia usaha untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Penyaluran kredit konsumen secara terkendali akan mendorong peningkatan permintaan masyarakat atas produk dan jasa dari dunia usaha. Pelaksanaan aktivitas perbankan yang sehat akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan suatu bangsa. Di Indonesia, industri perbankan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengembangkan dunia usaha, dan dampaknya mengurangi tingkat pengangguran ataupun kemiskinan

di Indonesia. Jadi, sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia, fungsi bank sebagai perantara keuangan harus berjalan dengan baik. Selain menjalankan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana, Bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran (*bill payment*), jasa penampungan pembayaran tagihan (*collection*), jasa penitipan barang berharga (*safe deposit box*) dan lain-lain. Sebagian besar jasa-jasa tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan, sehingga transaksi keuangan antar masyarakat akan semakin cepat, efektif dan efisien. Seluruh aktivitas Bank tersebut akan memberikan pendapatan bagi kelangsungan usaha bank tersebut. Sumber pendapatan terbesar Bank umumnya masih berupa selisih bunga bersih antara bunga kredit dengan biaya bunga dana pihak ketiga, sedangkan sumber pendapatan lain berasal dari fee jasa-jasa perbankan. Biasanya semakin maju perbankan di suatu negara, maka kontribusi pendapatan yang berasal dari *fee* jasa-jasa perbankan semakin besar. Pentingnya keberadaan Bank dalam suatu negara sepanjang sejarah telah terbukti dari abad ke abad. Ada beberapa teori yang mendukung perlunya kehadiran Bank yang menjadi kesimpulan umum bahwa bank adalah suatu industri usaha yang perlu hadir dan terus berkembang. (Ardansyah Putra Harahap dan Dwi Saraswati, 2020)

Peran Penting Perbankan Dalam Sistem Keuangan

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi

mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya. Perbankan merupakan salah satu industri keuangan yang menjadi bagian dari sistem keuangan di samping pasar modal, dana pensiun, asuransi, dan lainnya. Saat ini perbankan Indonesia masih memiliki pengaruh yang paling besar dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat dan perusahaan non keuangan masih menginvestasikan kelebihan dananya pada instrumen keuangan dari bank seperti tabungan, deposito, dan giro meskipun saat ini sudah tersedia alternatif investasi keuangan seperti saham di pasar modal, asuransi, dana pensiun, obligasi dan lain-lain. Demikian pula sebaliknya masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan dana masih mengandalkan kredit dari bank sebagai sumber dana meskipun sudah ada alternatif pencairan dana seperti menerbitkan saham, obligasi di pasar modal, dan lain-lain. Hal ini menjadi dasar bahwa perbankan masih merupakan anchor dalam sistem keuangan di Indonesia. Guncangan pada perbankan dapat berakibat pada gagal proses penghimpunan dana dan penyaluran dana pada sistem keuangan kita. Pelajaran berharga pernah dialami Indonesia ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998, dimana pada waktu itu biaya krisis sangat signifikan. Selain itu, diperlukan waktu yang lama untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Krisis

tahun 1998 ini membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga perekonomian yang berkelanjutan. Sistem keuangan yang tidak stabil cenderung rentan terhadap berbagai gejala sehingga mengganggu perputaran roda perekonomian. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan seperti:

1. Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif
2. Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi
3. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas
4. Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik. Atas dasar kondisi di atas, upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan sangatlah diperlukan, terutama untuk menghindari kerugian yang begitu besar lagi. Salah satu upaya adalah memastikan bahwa sistem perbankan di Indonesia berjalan dengan baik dan efisien. (Tirta Segara, 2019)

Di samping berperan dalam sistem keuangan, peran bank dalam suatu negara juga dapat dilihat dari harapan masyarakat atas keberadaan bank bagi mereka. Terkait

dengan harapan masyarakat tersebut maka ada tiga peran penting yang dijalankan oleh perbankan sebagai berikut:

1. Lembaga Kepercayaan (agent of trust)
2. Agen Pembangunan Negara (agent of development)
3. Pemberi Layanan (agent of services) (Tirta Segara, 2019)

Jenis Bank Berdasarkan Fungsi

Bank Sentral Bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, bank sentral yang ditunjuk oleh undang-undang adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia juga menjalankan peran dalam mengelola sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

1. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank)

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Dengan demikian, saat ini di Indonesia terdapat tiga macam bank, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.

Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

1. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah merupakan pemegang saham pengendalinya. Saat ini kepemilikan pemerintah pada bank dikoordinasikan oleh Menteri Negara BUMN. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi, contohnya Bank DKI, Bank Jabar Banten, Bank Jatim, Bank Sumsel, dan Bank Papua.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional

antara lain: Bank Central Asia, Bank Mega, Bank Mayapada, Bank Panin, Bank Artos, Bank Sahabat Sampoerna, dan Bank BTPN. Bank Kepemilikan Asing Bank kepemilikan asing adalah bank yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing, dimana pihak asing tersebut terbukti menjadi pengendali atas bank tersebut. Ada 3 bentuk bank kepemilikan asing di Indonesia yaitu, pertama, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri contohnya, Citibank, Bank Mizuho, Bank ICBC, dan Bank *Commonwealth*. Kedua, bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing sebesar 50% atau lebih contohnya Bank DBS Indonesia. Ketiga, bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing kurang dari 50% namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing tersebut, contohnya Bank Permata. (Tira Segara, 2019)

Jenis Bank Berdasarkan Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Bank Devisa

Adalah bank yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller cheque*, pembukaan

dan pembayaran *Letter of Credit*, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bank Non-Devisa

Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara dan dalam mata uang Rupiah.

Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasional

1. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Bunga merupakan harga yang ditetapkan bank dalam memasarkan produk-produk bank. Bank memberikan bunga kepada nasabah untuk menarik dana mereka (tabungan, giro dan deposito). Demikian pula pada saat nasabah meminjam kredit, maka bank menetapkan suku bunga sebagai harga yang harus dibayar nasabah debitur atas pinjaman tersebut. Metode bunga merupakan metode yang sudah ada sejak lama, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu. Metode bunga sudah menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

2. Bank Syariah

Bank syariah mulai berada di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi

sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. (Tira Segara, 2019)

2.1.2 Teori Permintaan Uang

Permintaan uang menurut Keynes adalah jumlah uang yang diminta masyarakat untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga dan untuk spekulasi dalam sebuah perekonomian. Menurut John Maynard Keynes ada 3 motif yang mempengaruhi permintaan uang tunai oleh masyarakat. Ketiga motif tersebut yaitu:

a. Motif Transaksi

Merupakan motif memegang uang untuk melakukan transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dilakukan setiap hari oleh setiap individu. Bila seseorang digaji dalam harian, maka ia akan memegang uang lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang menerima gaji bulanan. Menurut Keynes, orang rata-rata akan memegang uangnya sebesar $Y/2$. apabila ia menerima gaji Rp. 300.000 perbulan, maka ia akan rata-rata memeganguangnya sebesar Rp. 150.000.

$$Mdt = f(Y)$$

Dimana :

Mdt = Motif transaksi

Y= Pendapatan

Jadi seberapa besar atau kecilnya orang memegang uang tergantung dari pendapatannya. (<https://www.academia.edu>)

b. Motif Berjaga-jaga

Merupakan motif yang akan digunakan untuk menghadapi ketidakpastian masa yang akan datang, motif ini juga tergantung dengan seberapa banyak uang yang dihasilkan oleh setiap individu jika semakin besar maka uang yang digunakan untuk berjaga-jaga juga relatif lebih besar jadi motif ini juga dipengaruhi oleh pendapatan. .
(<https://www.academia.edu>)

$$M1 = Mdt + Mdp$$

Dimana :

M1= f(Y)

Mdt = Motif transaksi

Mdp = Motif jaga-jaga

Y = Pendapatan

c. Motif Spekulasi

Merupakan motif yang menyatakan bahwa uang merupakan salah satu alternatif bentuk asset selain bentuk asset lainnya, misal, kita memegang uang untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi jika kalau nanti ada surat berharga yang kita rasakan

sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat memperoleh keuntungan ataupun pendapatan dari kepemilikan surat berharga tersebut. (<https://www.academia.edu>)

$$m_2 = g(i)$$

Dimana :

m_2 = Permintaan uang untuk spekulasi

i = Suku bunga

2.1.3 KEBIJAKAN MONETER

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan Rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai Rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (*free floating*). Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. (<https://www.bi.go.id>)

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework* (ITF). Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan (*overriding objective*). Bank Indonesia terus

melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya. (<https://www.bi.go.id>)

Kerangka Kebijakan Moneter

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan *Inflation Targeting Framework* (ITF). ITF merupakan suatu kerangka kerja (*framework*) dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer (*base money*) sebagai sasaran kebijakan moneter. Berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008/2009, salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespons perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi *Flexible* ITF. *Flexible* ITF dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara forward looking (kebijakan moneter

diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/time lag kebijakan moneter). Akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian inherent dalam Flexible ITF. Kerangka Flexible ITF dibangun berdasarkan 5 elemen pokok, yaitu:

1. Strategi penargetan inflasi (Inflation Targeting) sebagai strategi dasar kebijakan moneter.
2. Integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi.
3. Peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.
4. Penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.
5. Penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

(<https://www.bi.go.id>)

Transmisi Kebijakan Moneter

Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebagai instrumen kebijakan utama untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Proses tersebut atau transmisi dari keputusan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut melalui berbagai

channel dan memerlukan waktu (*time lag*). Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memerlukan waktu (*time lag*). *Time lag* masing-masing jalur bisa berbeda. Dalam kondisi normal, perbankan akan merespons kenaikan/penurunan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) dengan kenaikan/penurunan suku bunga perbankan. Namun demikian, apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respons perbankan terhadap penurunan suku bunga *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) akan lebih lambat. Sebaliknya, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspons oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor riil. (<https://www.bi.go.id>)

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan Komunikasi

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 dan UU No. 6 tahun 2009, pada pasal 4 ayat 2 tertera bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang. Pemberian independensi tersebut, diimbangi dengan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas. (<https://www.bi.go.id>)

a. Transparansi

Prinsip yang mendasari transparansi kebijakan moneter adalah agar informasi yang disampaikan memungkinkan publik untuk memahami dan mampu mengantisipasi keputusan-keputusan bank sentral untuk mencapai target akhir yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, cakupan informasi yang disampaikan kepada publik meliputi aspek berikut:

1. Tujuan.

Bank sentral menyampaikan secara jelas dan konsisten mengenai apa yang akan dicapai dari kebijakan moneter, baik mengenai tujuan akhir maupun tujuan jangka pendek, serta rasionalitas dari penetapan tujuan tersebut. (<https://www.bi.go.id>)

2. Metode.

Bank sentral transparan terkait aktivitas prosedural dalam kebijakan moneter (menyampaikan operasi moneter yang dilakukan, hasil prakiraan dan model ekonomi yang dipergunakan termasuk gambaran pokok dan asumsi-asumsi yang digunakan). Hal tersebut untuk membentuk ekspektasi di pasar keuangan serta menghindari dan meminimalkan gejolak yang terjadi di pasar. Selain itu, hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan moneter bank sentral. (<https://www.bi.go.id>)

3. Pengambilan keputusan.

Bank sentral mengumumkan kebijakan yang ditempuh dengan pertimbangan yang mendasarinya, misalnya keputusan mengenai suku bunga kebijakan, segera setelah keputusan tersebut diambil. (<https://www.bi.go.id>)

Selain itu, ada beberapa pokok cakupan transparansi mengenai kebijakan moneter yang baik yang tertuang dalam “*Code of Good Practices on Transparency in Monetary and Financial Policies*”. Dokumen tersebut dikembangkan oleh IMF sejak tahun 1999 dan kini telah diikuti oleh banyak negara anggotanya. Beberapa pokok cakupan transparansi tersebut antara lain(<https://www.bi.go.id>):

- Kejelasan mengenai peran, wewenang, dan tujuan otoritas kebijakan moneter.
- Keterbukaan mengenai proses perumusan dan pelaporan kebijakan moneter.
- Ketersediaan informasi kebijakan moneter kepada publik.
- Akuntabilitas dan jaminan integritas dari otoritas moneter.

(<https://www.bi.go.id>)

b. Komunikasi Kebijakan Moneter

Efektivitas kebijakan moneter dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang efektif, terlebih dalam kondisi meningkatnya ketidakpastian. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter hanya dapat memengaruhi secara langsung suku bunga jangka pendek, sementara suku bunga jangka panjang lebih ditentukan oleh ekspektasi kebijakan moneter ke depan yang dapat diarahkan melalui komunikasi kebijakan. Komunikasi turut berperan dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia dengan cara memberikan pemahaman kepada publik terkait kebijakan moneter secara keseluruhan, membantu menggerakkan ekspektasi publik dan pelaku

pasar, serta mengurangi ketidakpastian ke depan. Komunikasi kebijakan moneter Bank Indonesia dilakukan melalui berbagai media antara lain(<https://www.bi.go.id>):

- Siaran Pers dan Konferensi Pers
- Publikasi berupa Laporan Kebijakan Moneter, Indonesia: Perekonomian Terkini dan Respons Kebijakan, Laporan Perekonomian Indonesia, Laporan Triwulanan DPR RI dll.
- *Website* Bank Indonesia
- *Talkshow* di radio dan televisi
- Seminar/Diskusi dengan *stakeholders*
- Diseminasi di daerah

Akuntabilitas

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 6/2009) mengamanatkan akuntabilitas Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan anggaran. Prinsip akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia diterapkan dengan cara menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat luas melalui media massa pada setiap awal tahun, mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, serta rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR. Akuntabilitas juga terkait erat dengan independensi. Semakin

besarnya independensi yang diberikan kepada bank sentral menuntut pula pentingnya akuntabilitas. (<https://www.bi.go.id>)

2.2 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode	Variabel	Hasil Peneliti
Annisa Indah Mutiasari	Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital.	Deskriptif kualitatif.	Teknologi digital sistem perbankan, user perbankan Indonesia,	Pada industri perbankan, tantangan di dunia digital ini semakin berkembang dan tidak terbendung kemajuan yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Hal ini karena bank tidak hanya bersaing dengan bank lainnya, namun di era digital ekonomi ini bank juga harus bersaing dengan perusahaan teknologi keuangan lainnya yang menawarkan keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya.
Thessalonica S.F. Supit, Johnny R.E. Tampi, dan Joanne Mangindaan	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BUMN dan Swasta Nasional Yang Terdaftar	Komparatif Kuantitatif	Bank BUMN, Bank swasta, Kinerja Keuangan	Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional baik dari sisi ROA, ROE, LDR dan CAR

	Pada Bursa Efek Indonesia.			
Khayatun Nufus, Awaluddin Muchtar, dan Fani Triyanto	Analisi Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEK (Studi Kasus PT. Bank BNI Tbk)	Deskriptif kuantitatif	Kesehatan bank BNI, Risk Profile, <i>Good Corporate Governance</i> , Earning, Capital	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank BNI dengan menggunakan metode RGEK ini menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Bank BNI “SEHAT” dilihat dari rata-rata penilaian.

2.3. Regulasi

2.3.1 *BRANCHLESS BANKING*

Berdasarkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012, sebagai layanan keuangan tanpa kantor fisik, *branchless banking* adalah inovasi yang diperlukan untuk mewujudkan terjadinya keuangan inklusif di Indonesia. Keuangan inklusif merupakan kondisi di mana seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses ke layanan keuangan sehingga memiliki kesempatan sama untuk menikmati fasilitasnya. Fasilitas ini termasuk pembiayaan mikro, asuransi mikro, serta tabungan. Dalam jangka panjang, *branchless banking* dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung serta menjaga kondisi keuangan rumah tangga sehingga kesenjangan pendapatan semakin sempit. Pada

akhirnya, penerapan *branchless banking* Indonesia adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menjaga kestabilan sistem keuangan. (<https://www.ocbcnisp.com>)

Fungsi *Branchless Banking*

Munculnya *branchless banking* membantu meningkatkan aktivitas keuangan pada wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan kantor perbankan. Adapun fungsi *branchless banking* adalah sebagai berikut. (<https://www.ocbcnisp.com>)

1. Membantu masyarakat

Fungsi pertama *branchless banking* adalah membantu masyarakat mengakses layanan perbankan. Karena layanan perbankan dilakukan oleh agen yang tersebar di berbagai wilayah, nasabah dapat dengan mudah melakukan aktivitas keuangan dasar seperti pembukaan rekening, penyetoran tabungan, penarikan tunai, dan transfer dana. Meski hanya melayani kebutuhan keuangan dasar, tak menutup kemungkinan di masa depan agen *branchless banking* dapat melayani aktivitas penyaluran kredit. (<https://www.ocbcnisp.com>)

2. Penyuluhan.

Menargetkan wilayah yang belum memiliki jaringan kantor perbankan, tugas selanjutnya dari *branchless banking* adalah memberikan penyuluhan pada masyarakat mengenai fungsi bank serta membuat program-program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Harapannya, semakin meluasnya penyuluhan mengenai fungsi dan manfaat bank untuk mengelola keuangan, semakin banyak pula

masyarakat yang tergerak untuk membuka rekening serta menggunakan layanan perbankan guna mengelola keuangannya. (<https://www.ocbcnisp.com>)

3. Memasarkan produk.

Fungsi terakhir *branchless banking* adalah untuk memasarkan produk-produk perbankan. Produk seperti tabungan dan transfer menjadi produk utama yang ditawarkan oleh *branchless banking* pada masyarakat awam untuk membangun kesadaran akan pentingnya fungsi perbankan. Namun beberapa penyelenggara *branchless banking* juga mulai menawarkan produk lainnya seperti penyaluran kredit dan asuransi. (<https://www.ocbcnisp.com>)

Meski bekerjasama dalam mengembangkan *branchless banking*, BI dan OJK memiliki ruang lingkup pengembangan yang berbeda.

BI bertugas untuk mengatur perputaran uang elektronik, sedangkan OJK bertugas untuk mengatur layanan perbankan seperti penyaluran kredit dan simpanan. Oleh karena itu, BI dan OJK juga memberikan persyaratan berbeda pada bank yang ingin berpartisipasi dalam *branchless banking* (<https://www.ocbcnisp.com>).

Syarat BI didasarkan pada PBI No.16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, yaitu:

- Berbadan hukum di Indonesia
- Menerbitkan uang elektronik sekurang-kurangnya selama 2 tahun
- Masuk dalam kategori bank BUKU 4
- Memenuhi persyaratan operasional BI

Sedangkan OJK membuat persyaratannya mengikuti POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), sebagai berikut (<https://www.ocbcnisp.com>):

- Berbadan hukum di Indonesia
- Mempunyai profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau 3
- Mempunyai jaringan kantor di wilayah timur Indonesia dan atau provinsi Nusa Tenggara Timur
- Mempunyai infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah, meliputi layanan sms banking atau mobile banking, serta internet banking atau host to host. (<https://www.ocbcnisp.com>)

Laku Pandai disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Kenapa Laku Pandai diperlukan? (<https://www.ojk.go.id>)

- Masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya. Antara lain, karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan. (<https://www.ojk.go.id>)
- OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif. (<https://www.ojk.go.id>)

- Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada Juni 2012, satu program di antaranya adalah *branchless banking*. (<https://www.ojk.go.id>)
- *Branchless banking* yang ada sekarang perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. (<https://www.ojk.go.id>)

Program ini bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Selain itu, juga melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota. (<https://www.ojk.go.id>)

Produk-produk yang disediakan dalam program ini adalah tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro. (<https://www.ojk.go.id>)

2.3.2 MAKROPRUDENSIAL DAN MIKROPRUDENSIAL

Istilah makroprudensial mengemuka dan menjadi sangat populer di sektor keuangan paska terjadinya krisis keuangan global. Krisis keuangan tersebut ditengarai terjadi karena belum diterapkannya kebijakan makroprudensial yang efektif dan maju, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan dinamika di sektor keuangan yang bersumber dari interaksi antara makro ekonomi dengan mikro ekonomi. Di Indonesia sendiri, pendekatan makroprudensial sudah dijalankan sebagai

bagian dari pemulihan ekonomi akibat krisis keuangan Asia tahun 1997/1998. Pengalaman krisis tersebut sesungguhnya telah memberikan pelajaran yang berharga, sehingga pada saat krisis keuangan global 2007/2008 yang dipicu oleh kegagalan produk subprime mortgage di Amerika Serikat, Bank Indonesia dengan kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial yang dimilikinya sudah lebih siap dengan berbagai langkah yang dapat menahan pemburukan kondisi ekonomi dan sistem keuangan di dalam negeri. Selanjutnya dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi mikroprudensial yang terkait dengan kesehatan, kinerja, dan kelangsungan usaha individual bank dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013, sementara Bank Indonesia diamanatkan untuk tetap menjalankan fungsi makroprudensial. (Bank Indonesia, 2016)

a. MAKROPRUDENSIAL

Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Di Indonesia, istilah makroprudensial secara implisit telah digunakan sejak awal tahun 2000 sebagai respons atas krisis keuangan tahun 1997/1998, yang ditandai dengan penyusunan kerangka stabilitas sistem keuangan Indonesia dan pembentukan Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK) di Bank Indonesia. Berdasarkan kerangka tersebut, Bank

Indonesia berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia melalui dua pendekatan, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial (BI, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2000, Bank Indonesia telah memerhatikan aspek makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran Bank Indonesia di bidang makroprudensial tertuang dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejalan dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank (mikroprudensial) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak tahun 2003, Bank Indonesia telah aktif mengomunikasikan hasil pemantauan (surveillance) atas stabilitas sistem keuangan secara semesteran. Hasil tersebut dituangkan dalam laporan yang dikenal dengan nama Kajian Stabilitas Keuangan (KSK). Dalam perjalanannya, kemampuan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan telah diakui secara internasional seperti terlihat dari keberhasilan Bank Indonesia dalam memperoleh penghargaan sebagai *“The Best Systemic and Prudential Regulator”* pada acara The Asian Banker Annual Leadership Achievement Awards yang diselenggarakan pada 25 April 2012, di Bangkok. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kemampuan Bank Indonesia dalam mengarahkan industri perbankan Indonesia untuk menerapkan aturan berstandar internasional, serta kemampuan merespons gejolak perekonomian global pada saat krisis hingga mampu menghindari terjadinya risiko sistemik (Bank Indonesia, 2016)

Kebijakan Makroprudensial Sebagai Komplemen

Kebijakan Lain Dalam implementasinya, kebijakan makroprudensial secara efektif bisa menjadi komplemen atau pelengkap dari kebijakankebijakan lain yang sudah ada sebelumnya. Karakteristik kebijakan makroprudensial yang berorientasi kepada sistem, mencakup dimensi runtun waktu (*time series*) dan antarsubjek (*cross section*), serta diimplementasikan dengan perangkat prudensial, diharapkan dapat menutup kekurangan (*gap*) kebijakan mikroprudensial, moneter, maupun fiskal dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan. (Bank Indonesia, 2016)

Kebijakan Makroprudensial dan Moneter

Kebijakan makroprudensial juga melengkapi kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas harga dan perekonomian secara makro tidak secara langsung bisa menjangkau permasalahan di level mikro sistem keuangan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kondisi krisis dapat terjadi meskipun dengankondisi inflasi dan output gap yang rendah (IMF, 2013a). Sumber-sumber risiko makroekonomi dapat berasal dari instabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, adanya pengawasan agregat pada sistem keuangan dari kebijakan makroprudensial dapat melengkapi fokus kebijakan moneter. Kebijakan makroprudensial dapat digunakan untuk melihat adanya potensi peningkatan risiko dari sistem keuangan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian secara keseluruhan. (Bank Indonesia, 2016)

Kebijakan Makroprudensial dan Fiskal

Kebijakan makroprudensial juga terkait erat dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang tepat dan efektif akan mengurangi potensiterjadinya shock makroekonomi, yang merupakan salah satu sumber pembentukan (*build up*) risiko sistemik (IMF, 2013b). Sebagai contoh, kenaikan (*boom*) pada konsumsi swasta dan rumah tangga dapat teramplifikasi oleh masuknya modal asing (*capital inflow*) yang tinggi secara persisten. Aliran modal asing yang masuk, antara lain melalui pasar saham dan obligasi, dapat meningkatkan kemampuan ekspansi usaha swasta sekaligus pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong konsumsi masyarakat. Apabila kenaikan konsumsi tersebut terjadi pada barang-barang dengan import content yang tinggi, dapat memicu terjadinya defisit transaksi berjalan (*current account deficit*) yang persisten. Di sisi lain, pelaku pasar akan cenderung semakin ambil risiko (*risk-taking*) memanfaatkan kondisi ekonomi yang sedang mengalami boom. Pada kondisi ini, kebijakan makroprudensial sendiri tidak dapat meredam boom yang ada. Diperlukan koordinasi kebijakan bersama Pemerintah untuk memperbaiki kondisi defisit transaksi berjalan dengan melakukan pemberian insentif pajak untuk mendorong produksi barangbarang yang memiliki nilai tambah (*value added*) sehingga barangbarang yang bersumber dari luar negeri dapat digantikan dengan barang-barang produksi dalam negeri. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dapat ditargetkan untuk meredam perilaku ambil risiko yang berlebihan dari pelaku pasar. (Bank Indonesia, 2016)

b. MIKROPRUDENSIAL

Mikroprudensial difokuskan pada kesehatan individu bank dengan melakukan analisis kesehatan bank khususnya terkait dengan kecukupan modal dalam menghadapi siklus usaha. Tujuan pengawasan mikroprudensial adalah melindungi nasabah dan menurunkan ancaman efek menular kebangkrutan bank terhadap perekonomian. Sedangkan pengawasan perilaku bisnis terkait dengan perilaku bank terhadap nasabahnya lebih difokuskan pada perlindungan konsumen melalui keterbukaan informasi, kejujuran, integritas dan praktik bisnis yang adil. Pengawasan mikroprudensial terhadap seluruh jasa keuangan di Indonesia sangat diperlukan untuk tingkat kesehatan masing-masing individu lembaga jasa keuangan sekaligus untuk melindungi kepentingan konsume pengguna jasa keuangan. Dengan demikian, fungsi pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK terdiri dari:

1. Pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan;
2. Pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan; dan
3. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. (OJK, 2019)

Pengaturan mikroprudensial terhadap seluruh industri jasa keuangan dilakukan oleh OJK untuk memastikan bahwa dari sisi kelembagaan, proses bisnis, *governance*, permodalan, likuiditas, maupun sistem pelaporan telah diatur secara lengkap dan menyeluruh. Pengaturan mikroprudensial ini diperlukan sebagai pedoman bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Di sisi lain pengaturan mikroprudensial ini sangat penting untuk menjamin bahwa pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia memiliki standar yang sama dengan

pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan demikian, pengaturan mikroprudensial yang dilakukan OJK harus mengacu pada *international best practices*. Sebagai contoh, pengaturan sektor perbankan akan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision, ketentuan asuransi akan mengacu pada *International Association of Insurance Supervisors* (IAIS), ketentuan pasar modal akan mengacu pada *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), dan ketentuan industri jasa keuangan syariah akan mengacu pada *Islamic Financial Services Board* (IFSB). (OJK, 2019)

Pengawasan mikroprudensial dilakukan secara menyeluruh terhadap kelembagaan, proses bisnis, *governance*, permodalan, likuiditas maupun sistem pelaporan untuk setiap lembaga jasa keuangan. Pengawasan mikroprudensial dapat dilakukan secara langsung (*on-site supervision*) dengan mendatangi lembaga jasa keuangan maupun dilakukan secara *off-site*. Perlunya pengawasan *on-site* dan *off-site* tersebut adalah untuk melihat dan memonitor secara langsung kinerja setiap lembaga jasa keuangan apakah sudah sesuai dan patuh terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK. Pengawasan mikroprudensial yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa tingkat kesehatan suatu lembaga jasa keuangan dapat termonitor, manajemen risikonya berjalan dengan baik, dan kepentingan konsumen terlindungi. (OJK, 2019)

Aspek-aspek Pengawasan Mikroprudensial yang Dilakukan oleh OJK

OJK yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia memiliki tugas utama sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sebagaimana telah diulas pada Bab 2 mengenai Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK. Khusus untuk sektor perbankan, Pasal 7 juga mengatur mengenai pengawasan mikroprudensial atas sektor tersebut di mana pada penjelasan pada Pasal 7 disebutkan bahwa pengaturan mikroprudensial meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian, dan pemeriksaan bank. Sementara itu, tugas dan wewenang pengawasan lebih lanjut yang dilakukan oleh OJK di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank diatur dalam undang-undang dan peraturan terpisah. (OJK, 2019)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, Bapepam memiliki kewenangan untuk(OJK, 2019):

1. Memberi:

1. Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek.
2. Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
3. Persetujuan bagi Bank Kustodian (OJK, 2019);

2. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat

3. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru
4. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran
5. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya (OJK, 2019)
6. Mewajibkan setiap Pihak untuk:
 - a. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud (OJK, 2019)

Melakukan pemeriksaan terhadap:

- . Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
- a. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;

Menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam (OJK, 2019);

- Mengumumkan hasil pemeriksaan;
- Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
- Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan penerapan sanksi dimaksud;
- Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
- Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
- Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya
- Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UUPM; dan
- Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini (OJK, 2019).

2.3.3 Kinerja Bank

Peraturan OJK NO.4/POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Pasal 6 yaitu : Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap factor-faktor (<http://www.ojk.go.id>):

- a. Profil risiko (risk profile)
- b. Good Corporate Governance (GCG)
- c. Rentabilitas (earnings) dan
- d. Permodalan (capital) (<http://www.ojk.go.id>).

Faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu RGEC : Pada PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi indikator adalah (<http://www.ojk.go.id>):

1) Risk profile Penilaian terhadap resiko terbagi menjadi 8 bagian yaitu:

a. Risiko kredit

Risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan pinjaman pokonya, atau tidak membayar pinjamannya sama sekali. Rasio kredit dihitung dengan menggunakan rasio Non Performing Loan:

$$NPL = (Kredit Bermasalah / Total Kredit) \times 100\%$$

b. Risiko pasar

Suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Rasio pasar dihitung dengan menggunakan rasio Interest Rate Risk:

$$IRR = \frac{RSA \text{ ((Rate Sensitive Assets) / RSL (Rate Sensitive Liabilities))} \times 100$$

c. Risiko likuiditas

Risiko kekurangan likuiditas terjadi karena adanya rush-penarikan dana secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank. Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio- rasio sebagai berikut:

1) Loan to Deposit Ratio (LDR)

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

2) Loan to Asset Ratio (LAR)

$$LAR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

3) Cash Ratio Alat

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat - alat Likuid yang dikuasai}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

d. Risiko operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal.

e. Risiko hukum

Risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak, hukum atau peraturan.

f. Risiko strategik

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

g. Risiko kepatuhan

Risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan suatu bank untuk melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, dan.

h. Risiko reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

2. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) ditinjau dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip GCG. GCG mencerminkan bagian manajemen dari CAMELS namun telah disempurnakan. Bank memperhitungkan dampak GCG perusahaan pada kinerja GCG bank dengan mempertimbangkan signifikan dan materialitas perusahaan anak dan atau signifikansi kelemahan GCG perusahaan anak.

3. Earning

Earning adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. Indikator penilaian rentabilitas adalah ROA (*Return On Assets*), ROE (*Return On Equity*), LDR (*Net Interest Margin*), dan BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) komponen laba actual terhadap proyeksi anggaran dan kemampuan komponen laba dalam meningkatkan permodalan. Karakteristik bank dari sisi rentabilitas adalah kinerja bank dalam menghasilkan laba, kestabilan komponen-komponen yang mendukung *core earning*, dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa depan. Penilaian terhadap faktor earnings didasarkan pada rasio yaitu:

1) Return on Assets (ROA)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100 \%$$

2) Return On Equity (ROE)

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Modal Inti}} \times 100 \%$$

3) Net Interest Margin (LDR)

$$\text{LDR} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-Rata Aktiva Produktif}} \times 100 \%$$

4) Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

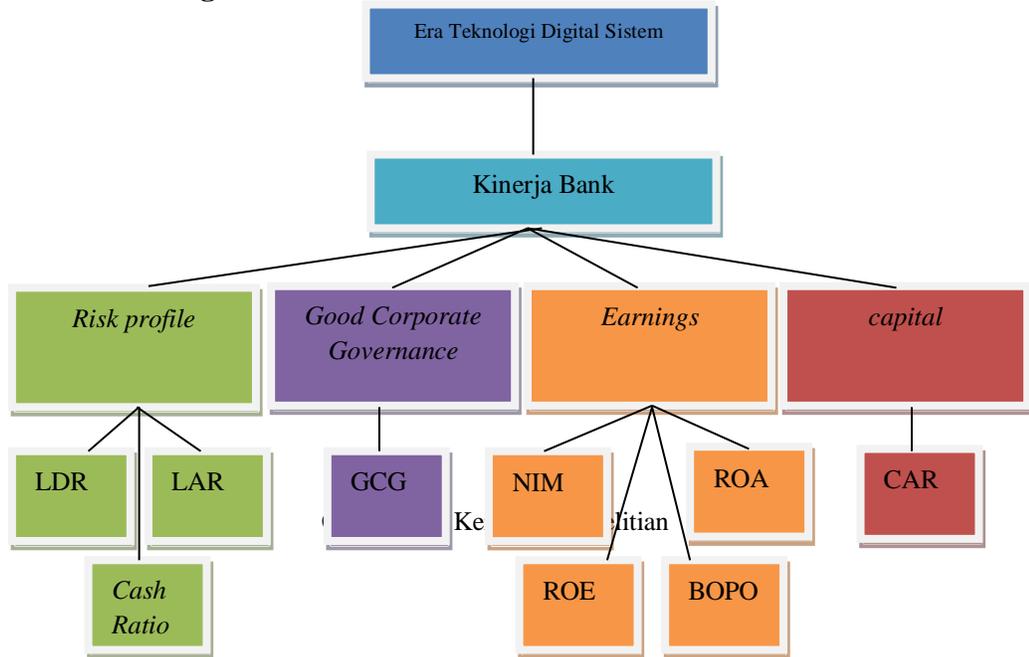
4. *Capital*

Capital / permodalan memiliki indicator antara lain rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil resiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Rasio kecukupan modal :

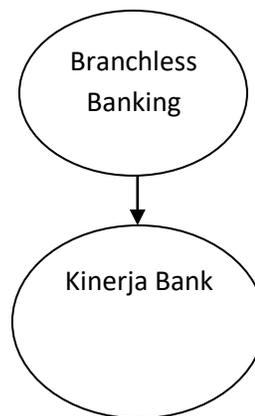
$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

2.4 Kerangka Penelitian

2.4.2 Kerangka Pemikiran



2.4.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.5 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesa

Dugaan sementara berdasarkan landasan teori dan konsep yang digunakan, dapat ditentukan beberapa hipotesis yaitu Teknologi digital sistem memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja bank BUMN Konvensional.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Metode Penelitian

3.1.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, analisis ini mendeskripsikan data sampel yang telah terkumpul tanpa kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai rata-rata dari masing-masing rasio Bank BUMN Konvensional serta mengetahui peringkat pada masing-masing Bank dengan metode RGEC.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang cara mengukur variabel.

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Branchless Banking	Inovasi yang diperlukan untuk mewujudkan terjadinya keuangan inklusif di Indonesia	www.ojk.go.id
Return On Assets	Rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba	www.media.neliti.com
Loan to Deposit Ratio	Rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek	www.media.neliti.com
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	Rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya	www.media.neliti.com
Net Interest Margin	Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktivitsnya untuk	www.media.neliti.com

	menghasilkan pendapatan bunga bersih	
Capital Adequacy Ratio	Merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan resiko kerugian.	www.media.neliti.com

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian dengan melihat data perkembangan kinerja Bank BUMN Konvensional dari tahun 2012-2021 yang disediakan oleh masing-masing laporan keuangan Bank dan OJK.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 1 bulan yaitu Agustus 2022 sampai September 2022.

3.4 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini semua populasi adalah sampel yaitu Bank BUMN Konvensional sehingga tidak ada metode khusus untuk pemilihan sampel.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang dipeoleh dari kinerja bank BUMN Konvensional tahun 2012-2021

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari hasil publikasi yang disajikan oleh laporan keuangan Bank dan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) terhadap ke 4 Bank BUMN Konvensional di Indonesia selama periode 2012-2021.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik Dokumentasi, yaitu diperoleh dari hasil publikasi yang disajikan oleh suatu instansi dan organisasi yang dimana dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari laporan keuangan Bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap ke 4 Bank BUMN Konvensional di Indonesia selama periode 2018-2022 tiap semester.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, analisis ini merupakan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan dan peyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pengguna data.

3.8 Analisa Model Ekonometrika Penelitian

3.8.1 Model Estimasi

Penelitian ini menggunakan model ekonometrika karena pada penelitian ini menggunakan data panel dalam kurun waktu lebih kurang 10 tahun. maka model ekonometrika yang akan digunakan dalm penelitian ini ialah sebagai bertikut:

$$K_{bit} = \alpha_0 + \alpha_1 BB_{rt} + \epsilon_{rt}$$

Dimana :

KB = Kinerja Bank BUMN Konvensional

BB = Branchless Banking

ε_{it} = Error Term

i = Jenis Bank BUMN Konvensional 1,2,3,4.

t = Tahun 2012 – 2021

3.8.2 Metode Estimasi

Penelitian mengenai kinerja bank bumh konvensional menggunakan data panel dari kurun waktu tahun 2012-2021 bagi setiap Bank BUMN Konvensional. Analisis trend dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan model regresi linier untuk metode kuadrat terkecil biasa atau OLS (*Ordinary Least Square Methode*) menggunakan *Eviews8* yang disajikan lebih sederhana dan mudah dimengerti.

Asumsi utama yang mendasari model regresi dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata : *disturbance term* = 0
2. Tidak terdapat Korelasi serial (*serial auto correlation*) diantara *disturbance term*
 $COV(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0 ; i \neq j$
3. Sifat *homocedasticity* dari *disturbance term* $var(\varepsilon_i) = \sigma^2$
4. *Covariance* antara ε_i dari setiap variabel bebas (x) = 0
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah di dispesifikasikan atau diformulasikan.
6. Tidak terdapat *collinerity* antara variabel-variabel bebas. Artinya variabel- variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.

3.9 Uji Asumsi Klasik

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara kinerja bank dengan jumlah cabang di Indonesia dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas)
2. Varian variabel yang konstan (tidak heteroskedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

A. Penaksiran

1. Korelasi (r)

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya suatu hubungan linier antara variabel-variabel yang telah ditentukan. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi mulai -1 sampai $+1$. Nilai $r = -1$ atau $+1$ menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut, jika nilai $r = 0$, mengindikasikan tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda $+$ (positif) dan $-$ (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jika bernilai $+$ positif maka variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang searah.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen sangat terbatas dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen yang memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependennya (Kuncoro, 2013).

B. Pengujian

1. Uji Individual (Uji t – Statistik)

Uji t dilakukan untuk melihat korelasi secara parsial dari masing-masing variabel bebas yang diamati terhadap variabel terikat. Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

Hipotesa

Branchless Banking Terhadap Kinerja Bank

- H₀ : $\alpha_1 = 0$ (*Branchless Banking* tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Bank)
- H_a : $\alpha_1 \neq 0$ (*Branchless Banking* berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Bank)

1) Uji Statistik t

Koefisien regresi dapat diketahui dengan cara menghitung nilai t dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

dimana: α_i : koefisien regresi

se : standar eror

i : 1,2,3....n

j : 1,2

dibandingkan dengan T-tabel : $\pm t (\alpha/2, n-1)$

2) Kriteria Uji

Terima H_0 jika $- T\text{-tabel} < T\text{-hitung} < + T\text{-tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Atau dalam distribusi kurva normal t.



BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kinerja Bank

A. Kinerja ROA

Tabel 4.1 Kinerja ROA

n	BRI	MANDIRI	BTN	BNI
2012	5,15	3,55	1,94	2,9
2013	5,03	3,66	1,79	3,4
2014	4,73	3,57	1,14	3,5
2015	4,19	3,15	1,61	2,6
2016	3,84	1,95	1,76	2,7
2017	3,69	2,72	1,71	2,7
2018	3,68	3,17	1,34	2,8
2019	3,5	3,03	0,13	2,4
2020	1,98	1,64	0,69	0,5
2021	2,72	2,53	0,81	1,4

Sumber : Laporan Keuangan Tiap Bank

ROA adalah Rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba. Data tabel diatas menunjukkan kinerja ROA pada setiap Bank dari tahun 2012- 2021. Nilai ROA pada Bank mengalami perubahan tiap tahunnya, nilai Roa tertinggi adalah Bank Mandiri yaitupada tahun 2012 namun trus mengalami penurunan pad tahun berikutnya, nilai ROA terendah yaitu pada Bank BTN yaitu sebesar 0,13% yang dimana akan dikatakan sehat jika Bank memliliki nilai ROA diatas 1,25%. Jika dilihat pada tahun 2020 nilai ROA mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid – 19 yang menyerang hampir seluruh Negara di dunia.

B. Kinerja NIM

Tabel 4.2 Kinerja NIM

TAHUN	BRI	MANDIRI	BTN	BNI
2012	8,42	5,58	5,83	5,9
2013	8,55	5,68	5,44	6,1
2014	8,51	5,94	4,47	6,2
2015	8,13	5,9	4,87	6,4
2016	8,27	6,29	4,98	6,2
2017	7,93	5,63	4,76	5,5
2018	7,45	5,52	4,32	5,3
2019	6,98	5,46	3,32	4,9
2020	6	4,48	3,06	4,5
2021	6,89	4,73	3,99	4,7

Sumber : Laporan Keuangan Tiap Bank

Net Interest Margin adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktivitasnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pada tahun 2020 rasio keempat bank mengalami penurunan yang disebabkan adanya covid-19. Nilai rasio tertinggi ada pada bank BRI pada tahun 2013 yaitu 8,55 % dan dikatakan bank sehat, jika berada <2% maka bank dikatakan kurang sehat dalam mengelola aktiva produktivitasnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.

C. Kinerja BOPO

Tabel 4.3 Kinerja BOPO

TAHUN	BRI	MANDIRI	BTN	BNI
2012	59,93	63,93	80,74	71
2013	60,58	62,41	82,19	67,1
2014	65,42	64,98	88,97	69,8
2015	67,96	69,67	84,83	75,5
2016	68,93	80,94	82,48	73,6
2017	69,14	71,17	52,06	70,8

2018	68,48	66,48	85,58	70,2
2019	10,1	67,44	98,12	73,2
2020	81,22	80,03	91,61	93,3
2021	74,3	67,26	89,28	81,2

Sumber : Laporan Keuangan Tiap Bank

Bopo adalah Rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Maka apabila semakin tinggi rasio BOPO mencerminkan kurangnya kemampuan Bank dalam menekan biaya operasionalnya sehingga dapat meLDRbulkan kerugian. Jika dilihat dari tabel diatas rasio terbesar yaitu pada Bank BTN tahun 2019 yaitu sebesar 98,12% yang berarti bank BTN tidak mampu menekan biaya operasionalnya pada tahun tersebut dan juga dikatakan Bank yang tidak sehat.karena Bank akan dikatakan sehat apabila nilai BOPO <95%.

D. Kinerja LDR

Tabel 4.4 Kinerja LDR

TAHUN	BRI	MANDIRI	BTN	BNI
2012	79,85	77,66	100,9	77,5
2013	88,54	82,97	104,42	85,3
2014	81,68	82,02	108,6	87,8
2015	86,88	87,05	108,78	87,8
2016	87,77	85,86	102,66	90,4
2017	88,13	88,11	103,13	85,6
2018	89,57	96,74	103,49	88,8
2019	88,64	96,37	113,5	91,5
2020	83,66	82,95	93,19	87,3
2021	83,67	80,04	92,86	79,7

Sumber : Laporan Keuangan Tiap Bank

Loan Deposit Ratio (LDR) adalah Rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin tinggi nilai rasionya maka seakin rendah tingkat kesehatan pada Bank tersebut dan akan dikatakan cukup sehat jika rasio LDR <100%. Pada tahun 2020 nilai LDR pada keempat bank mengalami

penurunan hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid – 19 yang artinya semakin besar tinggi kemampuan likuiditas pada keempat Bank tersebut daripada tahun sebelumnya. Jika dilihat pada Bank BTN dari tahun 2012 – 2019 nilai rasio LDR selalu berada di atas 100% yang menyatakan bahwa bank ini selama 8 tahun kurang sehat dalam memenuhi likuiditas jangka pendeknya.

E. Kinerja CAR

Tabel 4.5 Kinerja CAR

TAHUN	BRI	MANDIRI	BTN	BNI
2012	16,95	15,48	17,69	16,7
2013	16,99	14,93	15,62	15,1
2014	18,31	16,6	14,64	16,2
2015	20,59	18,6	16,97	19,5
2016	22,91	21,63	20,34	19,5
2017	21,95	21,64	18,87	18,5
2018	20,15	20,96	22,97	18,5
2019	21,52	23,28	23,31	19,7
2020	19,59	23,89	23,78	16,8
2021	24,27	19,6	25,34	19,7

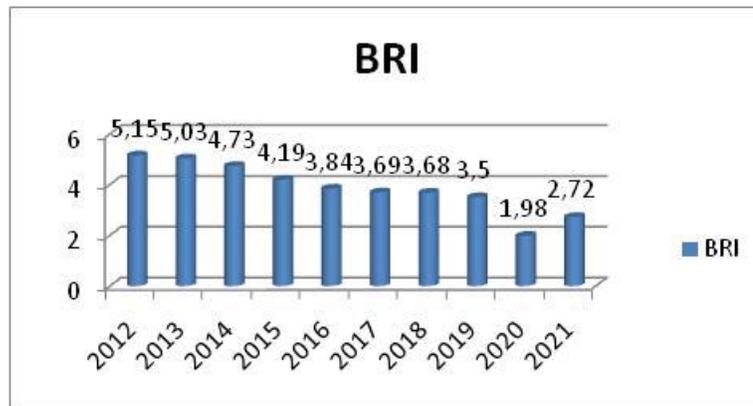
Sumber : Laporan Keuangan Tiap Bank

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan resiko kerugian. Akan dikatakan cukup sehat jika nilai rasio CAR 8% - 9%. Rasio paling tinggi ada pada bank BTN pada tahun 2021 yaitu sebesar 25,34% semakin tinggi rasio CAR maka akan semakin sehat bank tersebut. Pada masa pandemi covid – 19 Bank Mandiri dan BNI mengalami penurunan namun pada bank BRI dan BTN tidak mengalami penurunan hal ini membuktikan bahwa pandemi tidak mengurangi kecukupan modal pada bank tersebut.

4.2 Analisis Pengaruh Branchless Banking Terhadap Kinerja Bank BUMN

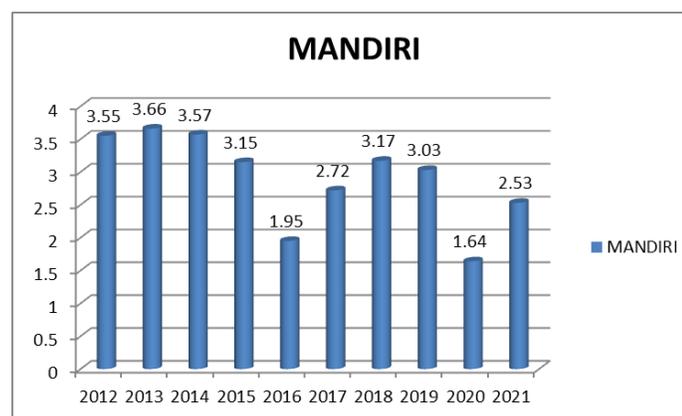
Di dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu bank BUMN di Indonesia.

1. Analisis Pengaruh terhadap Kinerja ROA



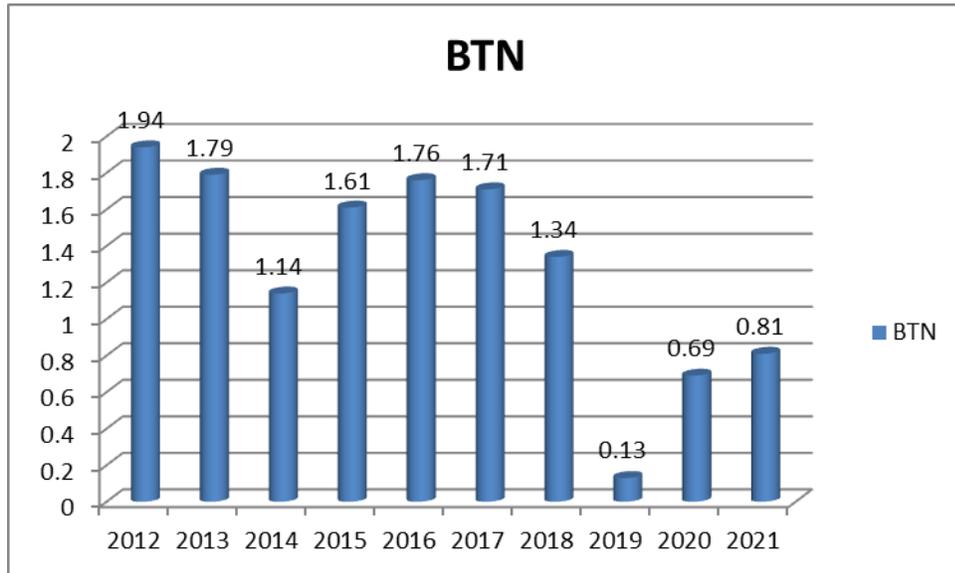
Gambar 4.1 Kinerja ROA BRI

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja ROA pada bank BRI semakin menurun namun kembali memulih pada tahun 2021 setelah mrngalami pandemi pada tahun 2019 kinerja ROA kembali naik di 2,72.



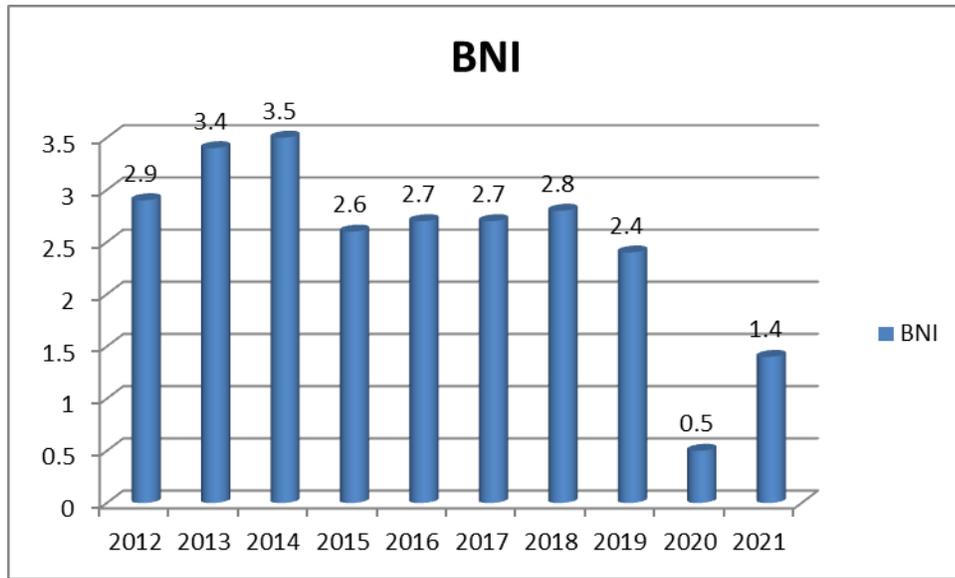
Gambar 4.2 Kinerja ROA Mandiri

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja ROA pada bank Mandiri semakin menurun namun kembali memulih pada tahun 2021 setelah mengalami pandemi pada tahun 2019 kinerja ROA kembali naik di 2,53.



Gambar 4.3 Kinerja ROA BTN

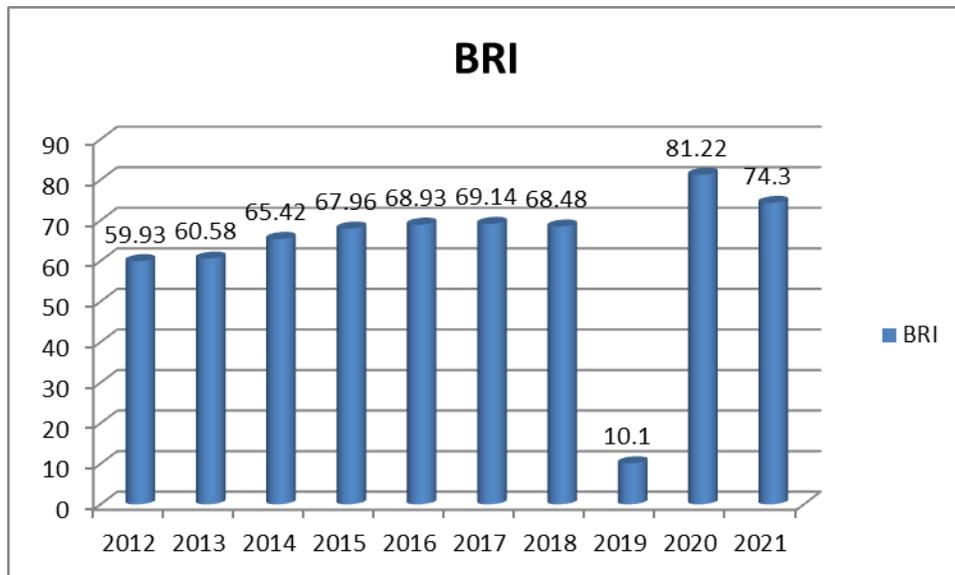
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja ROA pada bank BTN semakin menurun namun kembali memulih pada tahun 2020 dan terus naik setelah mengalami pandemi pada tahun 2019 kinerja ROA kembali naik di 0.69 pada tahun 2020 dan 0.81 pada tahun 2021.



Gambar 4.4 Kinerja ROA BNI

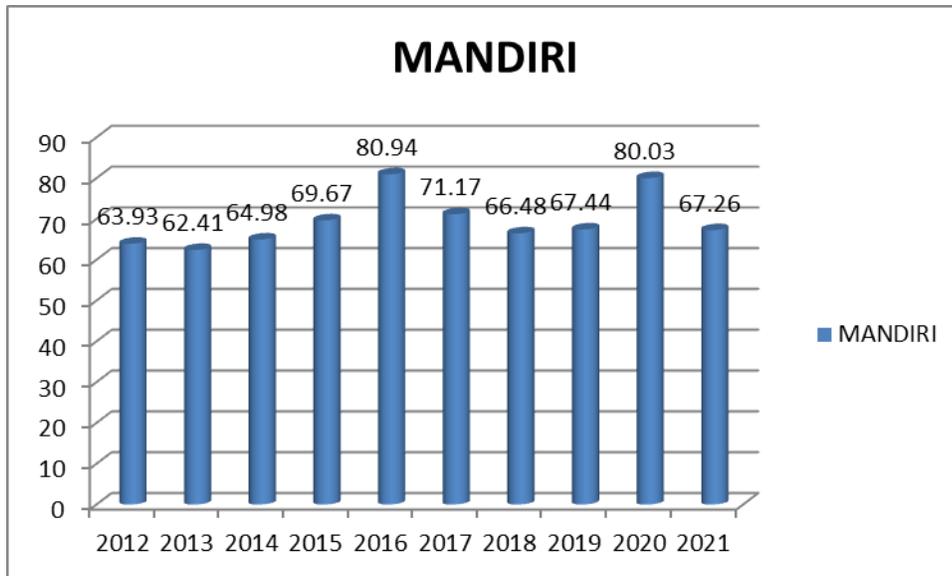
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja ROA pada bank BTN semakin menurun namun kembali memulih pada tahun 2021 setelah mengalami pandemi pada tahun 2019 kinerja ROA kembali naik di 1.4 pada tahun 2021.

2. Analisis Pengaruh terhadap Kinerja BOPO



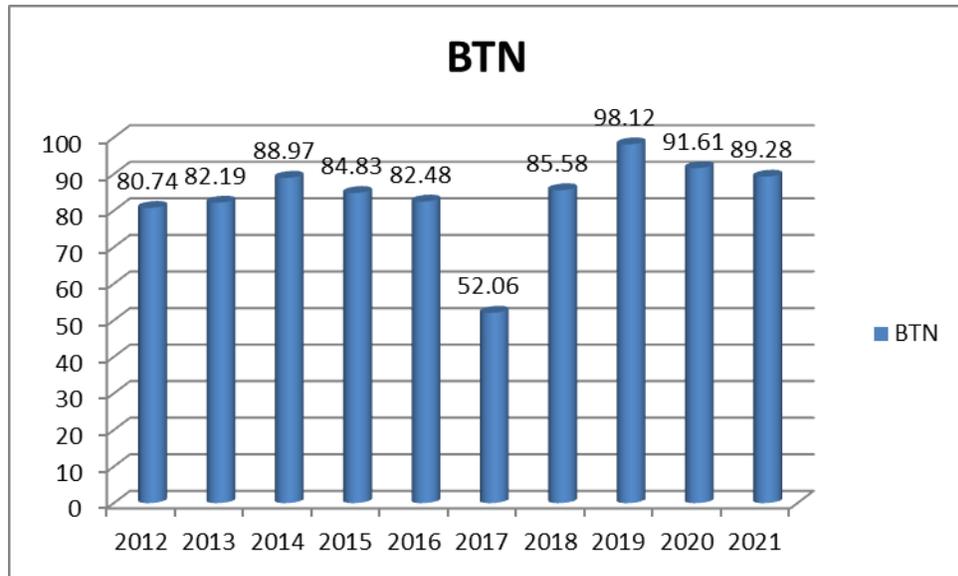
Gambar 4.5 Kinerja BOPO BRI

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja BOPO bank BRI menurun pada tahun 2019 hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid 19 yang terjadi hampir di seluruh dunia, namun pada tahun berikutnya kinerja BOPO pada bank BRI kembali membaik yaitu naik menjadi 81.22 yang sebelumnya berada pada 10.1.



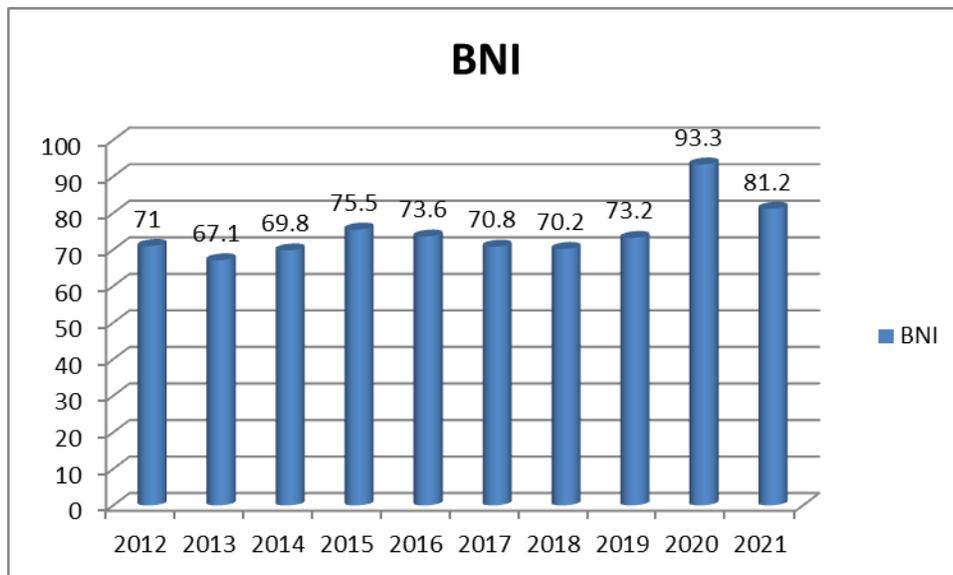
Gambar 4.6 Kinerja BOPO Mandiri

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja BOPO bank Mandiri menurun pada tahun 2017 dan terus menurun hingga tahun 2019, namun pada tahun berikutnya kinerja BOPO pada bank Mandiri kembali membaik yaitu naik menjadi 80.03 yang sebelumnya berada pada 67.44



Gambar 4.7 Kinerja BOPO BTN

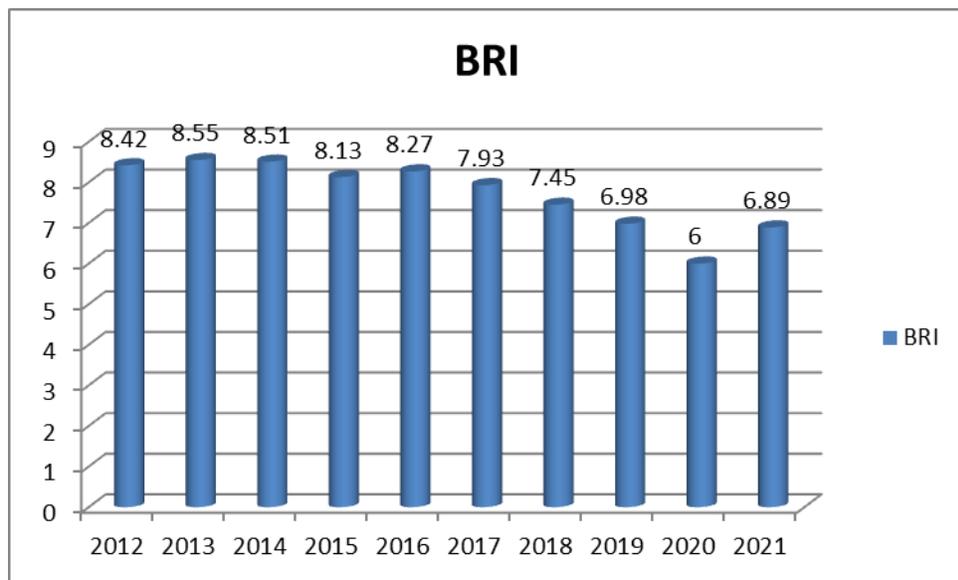
Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa kinerja BOPO bank BTN berbeda dengan bank lainnya yang mengalami penurunan pada saat pandemi covid 19 yang justru mengalami kenaikan yaitu 98.12 pada tahun 2019 namun pada tahun berikutnya sedikit mengalami penurunan yaitu 91.61.



Gambar 4.8 Kinerja BOPO BNI

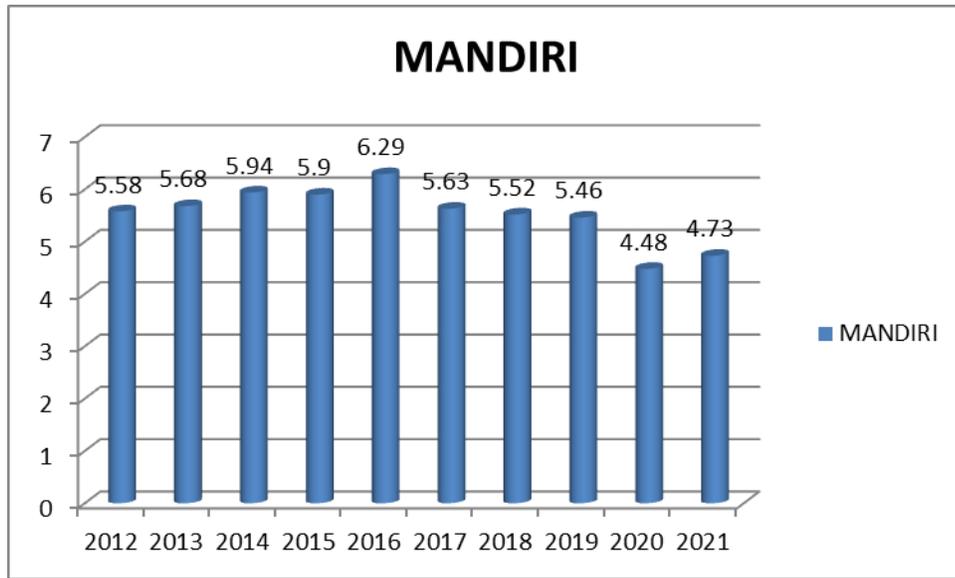
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja BOPO bank BNI menurun pada tahun 2019 yang disebabkan oleh adanya pandemi covid 19, namun pada tahun berikutnya kinerja BOPO pada bank Mandiri kembali membaik yaitu naik menjadi 93.3 yang sebelumnya berada pada 73.2

3. Analisis Pengaruh terhadap Kinerja CAR



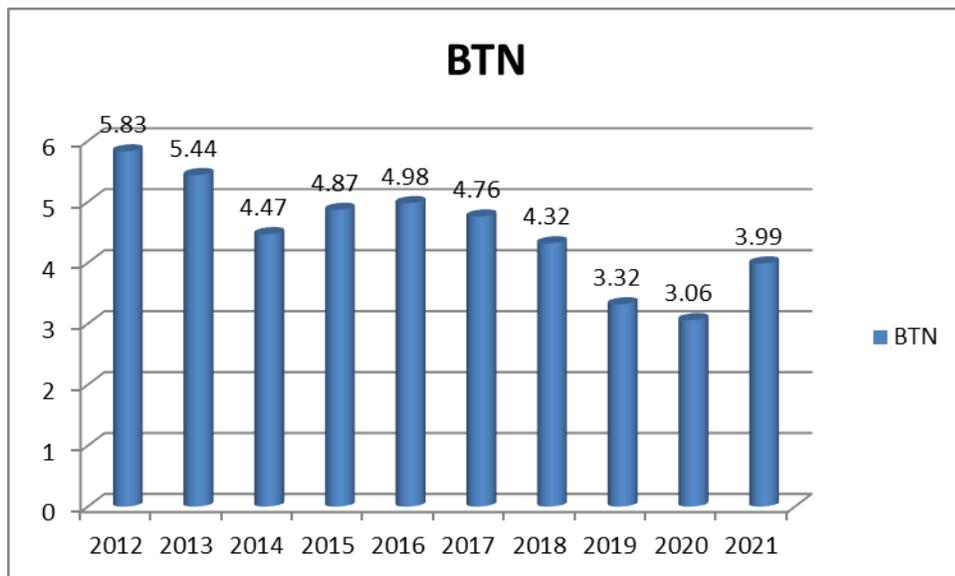
Gambar 4.9 Kinerja CAR BRI

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja CAR bank BRI terus menurun hingga tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 6.89.



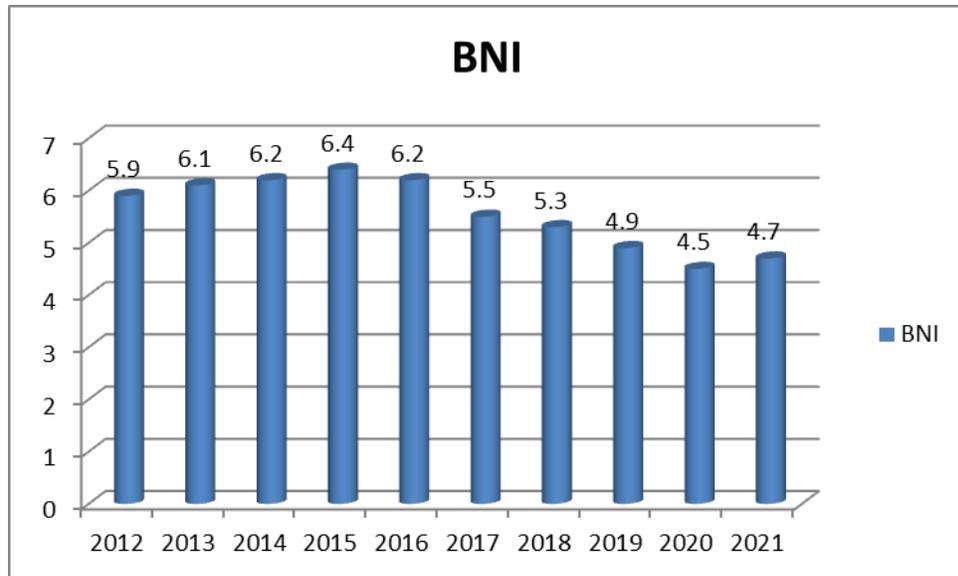
Gambar 4.10 Kinerja CAR Mandiri

Dapat terlihat dari gambar diatas bahwa kinerja CAR pada bank Mandiri terus menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2020 lalu mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu 4.73.



Gambar 4.11

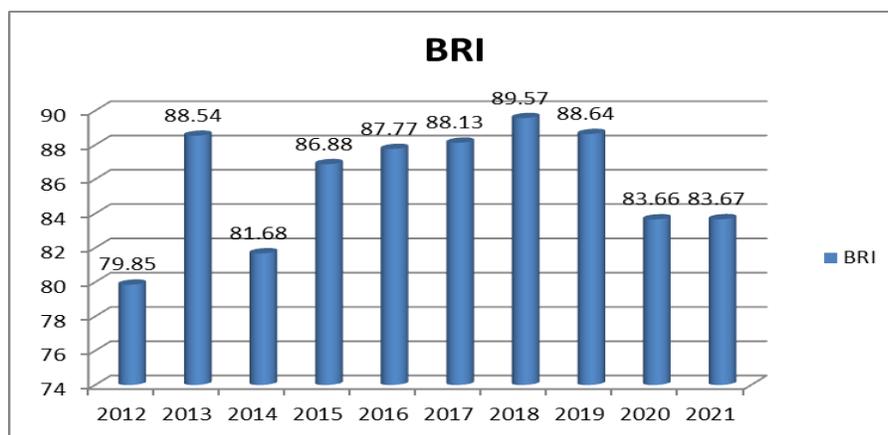
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja CAR bank BRI terus menurun hingga tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 3.99



Gambar 4.12

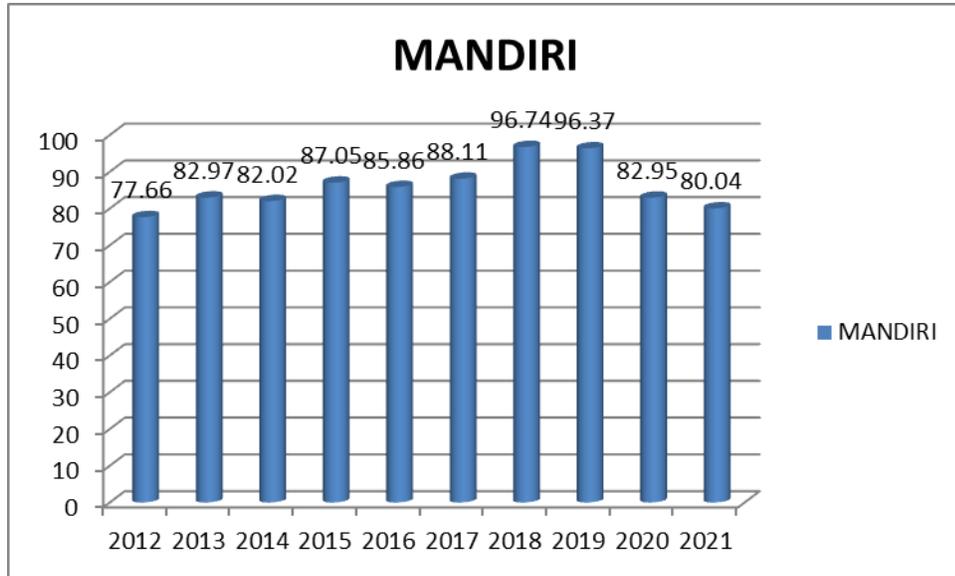
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja CAR bank BRI terus menurun hingga tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 4.7

4. Analisis Pengaruh terhadap Kinerja LDR



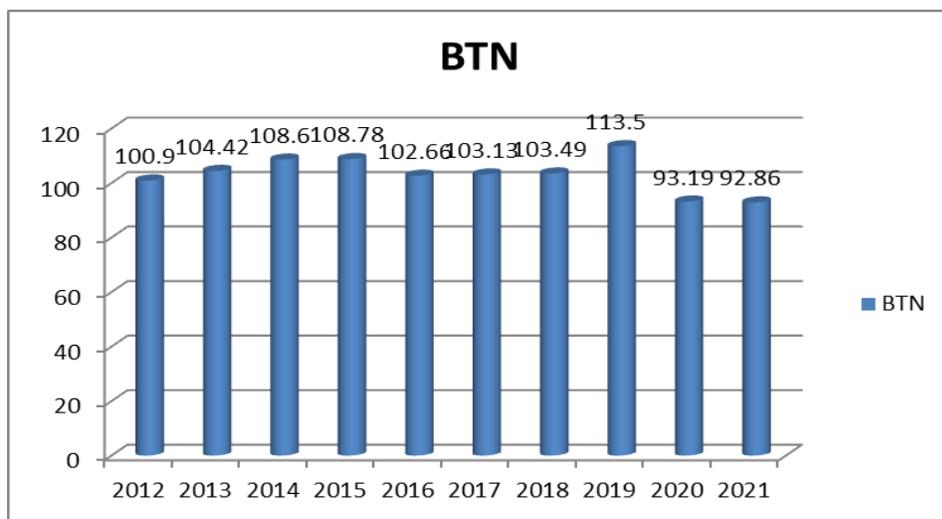
Gambar 4.13 Kinerja LDR BRI

Dari gambar diatas terlihat bahwa kinerja bank LDR BRI terus naik pada tahun 2015 namun kembali menurun cukup jauh pada tahun 2020 yaitu 83.66.



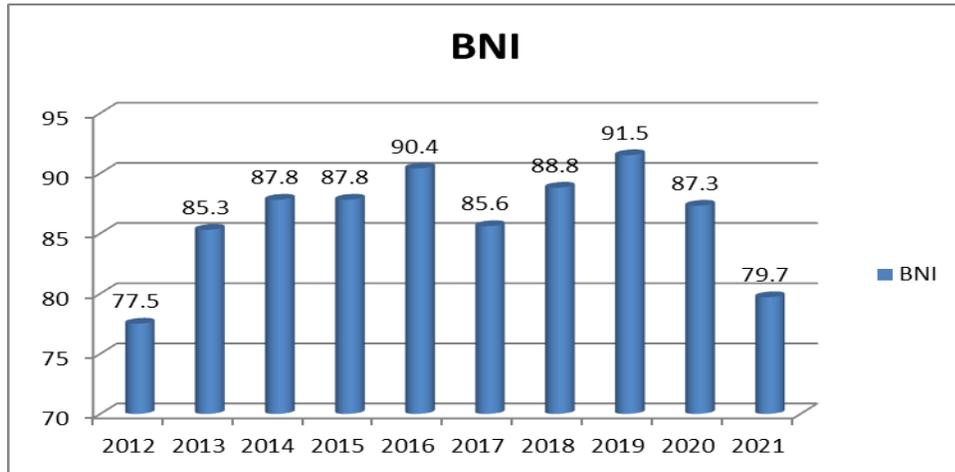
Gambar 4.14 Kinerja LDR Mandiri

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja LDR bank Mandiri cukup stabil meski ada kenaikan atau penurunan namun tidak terlalu jauh namun setelah pandemi kinerja terus menurun hingga tahun 2021.



Gambar 4.15 Kinerja LDR BTN

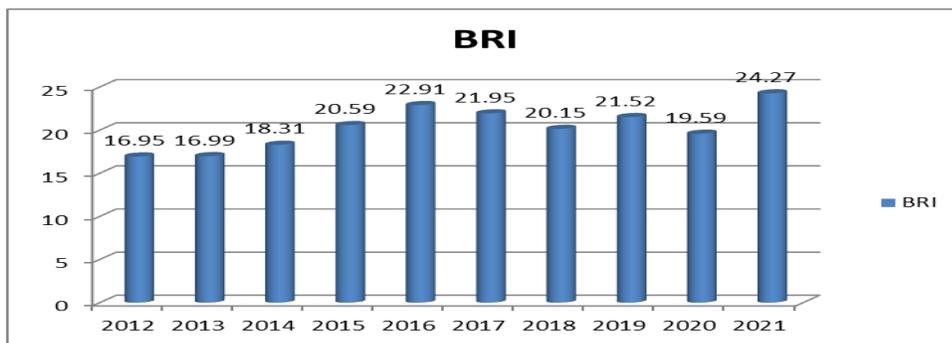
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja LDR bank Mandiri cukup stabil meski ada kenaikan atau penurunan namun tidak terlalu jauh namun setelah pandemi kinerja terus menurun hingga tahun 2021.



Gambar 4.16 Kinerja LDR BNI

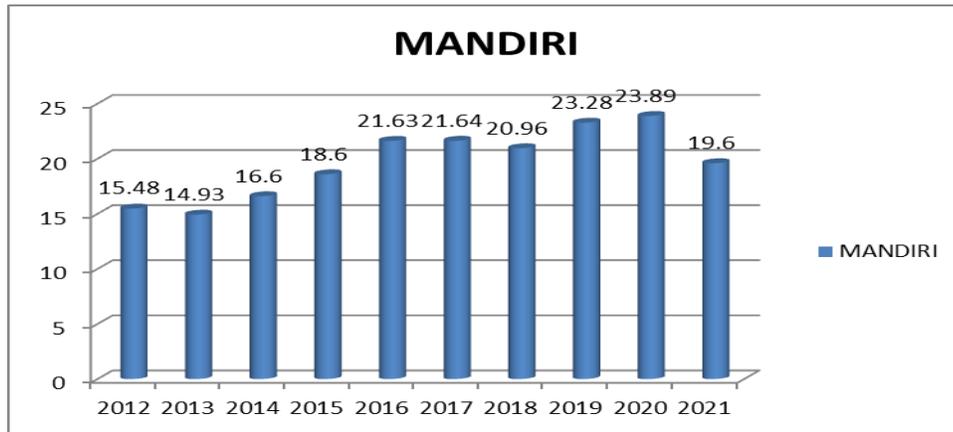
Dari gambar diatas terlihat bahwa kinerja LDR naik pada tahun 2019 hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid 19 namun kembali menurun pada tahun 2020 yaitu sebesar 87.3

5. Analisis Pengaruh terhadap Kinerja CAR



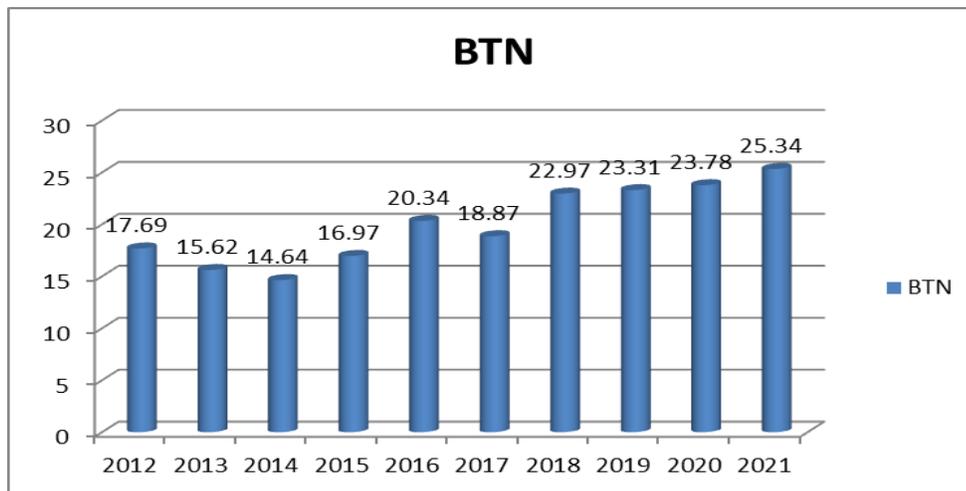
Gambar 4.17 Kinerja CAR BRI

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa kinerja CAR pada bank BRI yang cukup stabil meski ada kenaikan atupun penurunan namun tidak terlalu jauh dan pada tahun 2021 kinerja CAR pada bank BRI cukup baik yaitu 24.27.



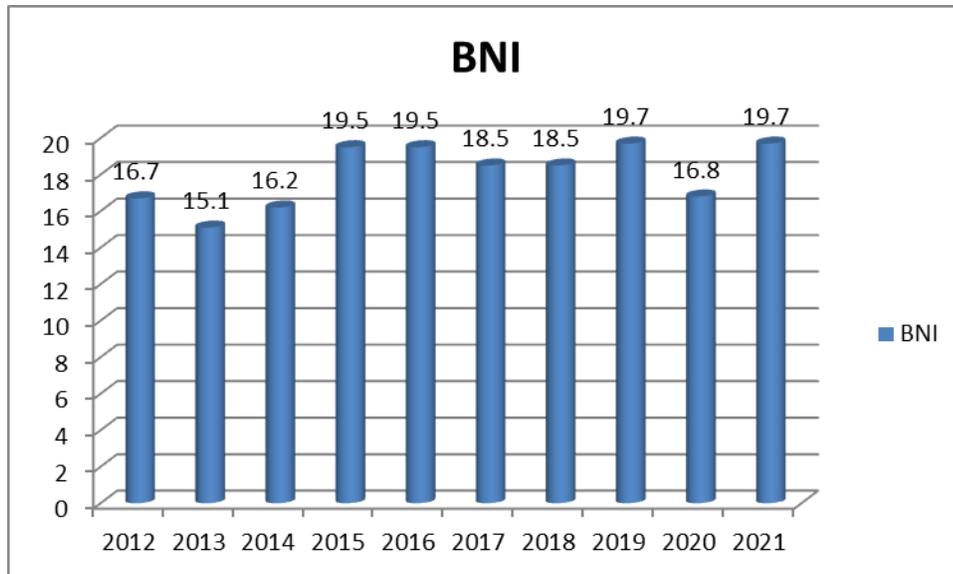
Gambar 4.18 Kinerja CAR Mandiri

Pada gambar diatas kinerja CAR bank Mandiri cenderung naik walau ada penurunan namun tidak terlalu jauh dan signifikan, namun pada tahun 2021 CAR pada bank Mandiri ini mengalami penurunan yang cukup jauh yaitu 19.6.



Gambar 4.19 Kinerja CAR BTN

Pada gambar diatas terlihat bahwa kinerja CAR pada bank BTN terus mnungkat walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 18.87 namun kembali naik pada tahun berikutnya naik hingga tahun 2021 yaitu 25.34.



Gambar 4.20 Kinerja CAR BNI

Jika dilihat pada gambar diatas terlihat bahwa kinerja CAR bank BNI cukup baik pencapaian tertinggi yaitu pada tahun 2019 dan 2021 yaitu sama-sama 19.7 dan yang terendah pada tahun 2013 15.1

4.3 Hasil Analisis Regresi

Gambar 4.21
Hasil Regresi Variabel CAR

Dependent Variable: CAR
Method: Least Squares
Date: 09/11/22 Time: 18:26
Sample: 2012 2021
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-68.12925	52.63036	-1.294486	0.2316
CAB	0.008356	0.003008	2.778381	0.0240

R-squared	0.491075	Mean dependent var	77.95700
Adjusted R-squared	0.427459	S.D. dependent var	9.654428
S.E. of regression	7.305162	Akaike info criterion	6.991896
Sum squared resid	426.9231	Schwarz criterion	7.052413
Log likelihood	-32.95948	Hannan-Quinn criter.	6.925509
F-statistic	7.719399	Durbin-Watson stat	0.844609
Prob(F-statistic)	0.023984		

Dari hasil uji regresi pertama pada gambar diatas tidak terdapat masalah karena nilai probabilitas berada pada $\alpha < 15\%$ (0,15) yang berarti variabel bebas memiliki nilai prob/ signifikan terhadap variabel CAR yaitu 0,0240 . Lalu dilakukan pengujian pada regresi multikolinearitas.

Gambar 4.22
Hasil Regresi Multikolinearitas Variabel CAR

Variance Inflation Factors
Date: 09/11/22 Time: 18:27
Sample: 2012 2021
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2769.955	519.0546	NA
CAB	9.05E-06	519.0546	1.000000

Sumber : E-Views 12 dan Diolah

Hasil uji diatas menunjukkan nilai Centered VIF cabang CAB lebih kecil dari 10($VIF < 10$) maka artinya bahwa dalam hasil regresi tidak terjadi multikolinearitas. Karena tidak terjadi multikolinearitas akan dilakukan uji heteroskedestisitas dengan hasil sebagai berikut.

Gambar 4.23
Hasil Regresi Heteroskedestisitas Variabel CAR

Heteroskedasticity Test: Harvey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.945632	Prob. F(1,8)	0.3593
Obs*R-squared	1.057088	Prob. Chi-Square(1)	0.3039
Scaled explained SS	0.426078	Prob. Chi-Square(1)	0.5139

Test Equation:
Dependent Variable: LRESID2
Method: Least Squares
Date: 09/11/22 Time: 18:28
Sample: 2012 2021
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.51050	10.74298	1.257612	0.2440
CAB	-0.000597	0.000614	-0.972436	0.3593

R-squared	0.105709	Mean dependent var	3.073709
Adjusted R-squared	-0.006078	S.D. dependent var	1.486629
S.E. of regression	1.491139	Akaike info criterion	3.813815
Sum squared resid	17.78797	Schwarz criterion	3.874332
Log likelihood	-17.06907	Hannan-Quinn criter.	3.747428
F-statistic	0.945632	Durbin-Watson stat	1.926779
Prob(F-statistic)	0.359314		

Berdasarkan hasil diatas nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai prob. Chi Square(1) pada Obs *R-Squared yaitu sebesar 0,3039 oleh karena itu p value $> 0,15$ berarti model bersifat heteroskedestisitas.

4.4 Uji Statistik

Uji signifikan Parameter Individual (Uji-t)

Uji statistik dilakukan bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independet secara individual menjelaskan variasi variabel dependen.

Regresi pengaruh variabel cabang (CAB).

$df(n-k) = 10-1 = 9$ dengan ($\alpha=5\%$) maka nilai t_{tabel} sebesar 2.26216

4.5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas.

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang pertama ataupun yang kedua terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik adalah seharusnya terbebas dari multikolinearitas, dan dapat dilihat dari hasil analisa model pertama hingga kelima tidak ada ditemukan multikolinearitas, karena tidak ada tanda koefisien yang berubah (sesuai dengan hipotesa).

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas dan jika berbeda disebut tidak terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari heterokedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji statistik *Durbin Watson* yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh.

Pada model pertama setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan uji logaritma natural satu variabel dan diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar :

$CAR = 0.844609$, artinya model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis jumlah cabang bank umum milik pemerintah setiap tahunnya menunjukkan penurunan namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan.
2. ROA pada tiap bank selalu berubah setiap tahunnya, nilai ROA juga tidak sama pada setiap bank rasio tertinggi ada pada bank BRI yaitu sebesar 5.15 pada tahun 2012 dan rasio terendah ada pada bank BTN yaitu pada tahun 2020 sebesar 0.13. hal ini membuktikan bahwa jumlah cabang secara keseluruhan akan mempengaruhi ROA namun dampaknya akan berbeda untuk setiap bank.
3. *Net Interest Margin* adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktivitasnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pada tahun 2020 rasio keempat bank mengalami penurunan yang disebabkan adanya covid-19. Nilai rasio tertinggi ada pada bank BRI pada tahun 2013 yaitu 8,55 % dan dikatakan bank sehat, jika berada <2% maka bank dikatakan kurang sehat dalam mengelola aktiva produktivitasnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.
4. Bopo adalah Rasio yang menggambarkan efesiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Maka apabila semakin tinggi rasio BOPO mencerminkan kurangnya kemampuan Bank dalam menekan biaya

operasionalnya sehingga dapat meCARbulkan kerugian. Jika dilihat dari tabel diatas rasio terbesar yaitu pada Bank BTN tahun 2019 yaitu sebesar 98,12% yang berarti bank BTN tidak mampu menekan biaya operasionalnya pada tahun tersebut dan juga dikatakan Bank yang tidak sehat.karena Bank akan dikatakan sehat apabila nilai BOPO <95%.

5. *Loan Deposit Ratio (LDR)* adalah Rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin tinggi nilai rasionya maka seakin rendah tingkat kesehatan pada Bank tersebut dan akan dikatakan cukup sehat jika rasio LDR <100%. Pada tahun 2020 nilai LDR pada keempat bank mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid – 19 yang artinya semakin besar tinggi kemampuan likuiditas pada keempat Bank tersebut daripada tahun sebelumnya. Jika dilihat pada Bank BTN dari tahun 2012 – 2019 nilai rasio LDR selalu berada diatas 100% yang menyatakan bahwa bank ini selama 8 tahun kurang sehat dalam memenuhi likuiditas jangka pendeknya.
6. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan resiko kerugian. Akan dikatakan cukup sehat jika nilai rasio CAR 8% - 9%. Rasio paling tinggi ada pada bank BTN pada tahun 2021 yaitu sebesar 25,34% semakin tinggi rasio CAR maka akan semakin sehat bank tersebut. Pada masa pandemi covid – 19 Bank Mandiri dan BNI mengalami penurunan namun pada bank BRI dan BTN tidak mengalami

penurunan hal ini membuktikan bahwa pandemi tidak mengurangi kecukupan modal pada bank tersebut.

7. Berdasarkan Hasil uji hipotesis berhubungan dengan CAR memperlihatkan bahwa $t \text{ statistic} > t \text{ tabel}$ $0.994985 > 2.26216$). Maka ketentuannya tolak H_0 , artinya bahwa variabel cabang tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap LDR

5.2 Saran

1. Branchless banking berpengaruh terhadap kinerja bank oleh karena itu setiap bank perlu adanya kebijakan yang tepat untuk menambah atau mengurangi jumlah kantornya khususnya di Indonesia.
2. Bank umum milik pemerintah juga harus meningkatkan teknologi yang terus menerus berkembang sehingga kebijakan Branchless Banking akan berhasil karena dengan adanya pengurangan kantor dan beralih menjadi digital tentunya akan mengurangi biaya operasional.

DAFTAR PUSTAKA

2011. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank, serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Jakarta : Bank Indonesia.
2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.
- Agus, 2016. Mengupas kebijakan Makrorudensial, Jakarta : Bnk Indonesia
- Annisa (2018), "Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Garuda Madju Cipta"
- CNBC Indonesia, "Semua Bakal Digital, Begini Masa Depan Perbankan RI", 03 November 2021. <https://www.cnbcindonesi.com/market/211103102154-17288618/semua-bakal-digital-begini-masa-depan-perbankan-ri>.
- Gusevi, Shara Putri (2019), "Pengaruh E-Banking Terhadap Kinerja Keuangan Bnak Umum Di Indonesia Dengan Variabel Kontrol Risiko Kredit, Likuiditas Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Periode 2014-2017 "
- Harun, Usman. "Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan LDR, LDR, LDR, BOPO, NPL, Terhadap ROA" Jurnal Riset Bisnisdan Manajemen Vol 4, No. 1, 2016: 67-82.
- Jais, Mu'asraful(2018), Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sinjai.
- Kasmir. 2011. Bank dan Perbankan . Jakarta : Rajawali Pers.
- Mankiw, N.G. 2006. Teori Makroekonomi. Jakarta : Erlangga

- Mutiasar, Annisa Indah. "Perbankan Industri Perbankan Di Era Digital" Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol IX, No. 2.2020: 28-41
- Nufus, Khayatun, dkk."Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC"Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. Vol 2, No. 5. 2018 : 74-93
- OCBC NISP, "Apa Itu Branchless Banking? Ini Perbedaannya Versi BI dan OJK", 10 Januari 2022. <https://www.ocbcnisp.com/id/articel/2022/01/10/branchless-banking-adalah>.
- Octaviya, Windya Suci (2018), Kesenjangan Tabungan Onvestasi Domestik (Saving-Investmentgap) di Kawasan Asean.
- Santoso. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Salemba empat.
- Saputra, Eko (2018), "Analisis Keterkaitan Kebijakan Mikropudensial Dngn Kebijakan Makroprudensial"
- Segara, Tirta.2019. Buku 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.
- Solikin, suseno. 2002. Uang. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Thessalonica, dkk. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BUMN dan Swasta Nasional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia" Jurnal EMBA. Vol. 7, No. 8. 2019 : 3398-3407
- Wartowardojo, Agus D.w. 2016. Mengupas Kebijakan Makroprudensial. Jakarta : Bank Indonesia.

Lampiran

A. Kinerja ROA

TAHUN	BRI	MANDIRI	BTN	BNI
2012	5,15	3,55	1,94	2,9
2013	5,03	3,66	1,79	3,4
2014	4,73	3,57	1,14	3,5
2015	4,19	3,15	1,61	2,6
2016	3,84	1,95	1,76	2,7
2017	3,69	2,72	1,71	2,7
2018	3,68	3,17	1,34	2,8
2019	3,5	3,03	0,13	2,4
2020	1,98	1,64	0,69	0,5
2021	2,72	2,53	0,81	1,4

B. Kinerja LDR

TAHUN	BRI	MANDIRI	BTN	BNI
2012	8,42	5,58	5,83	5,9
2013	8,55	5,68	5,44	6,1
2014	8,51	5,94	4,47	6,2
2015	8,13	5,9	4,87	6,4
2016	8,27	6,29	4,98	6,2
2017	7,93	5,63	4,76	5,5
2018	7,45	5,52	4,32	5,3
2019	6,98	5,46	3,32	4,9
2020	6	4,48	3,06	4,5
2021	6,89	4,73	3,99	4,7

C. Kinerja BOPO

TAHUN	BRI	MANDIRI	BTN	BNI
2012	59,93	63,93	80,74	71
2013	60,58	62,41	82,19	67,1
2014	65,42	64,98	88,97	69,8
2015	67,96	69,67	84,83	75,5
2016	68,93	80,94	82,48	73,6

2017	69,14	71,17	52,06	70,8
2018	68,48	66,48	85,58	70,2
2019	10,1	67,44	98,12	73,2
2020	81,22	80,03	91,61	93,3
2021	74,3	67,26	89,28	81,2

D. Kinerja LDR

TAHUN	BRI	MANDIRI	BTN	BNI
2012	79,85	77,66	100,9	77,5
2013	88,54	82,97	104,42	85,3
2014	81,68	82,02	108,6	87,8
2015	86,88	87,05	108,78	87,8
2016	87,77	85,86	102,66	90,4
2017	88,13	88,11	103,13	85,6
2018	89,57	96,74	103,49	88,8
2019	88,64	96,37	113,5	91,5
2020	83,66	82,95	93,19	87,3
2021	83,67	80,04	92,86	79,7

E. Kinerja LDR

TAHUN	BRI	MANDIRI	BTN	BNI
2012	16,95	15,48	17,69	16,7
2013	16,99	14,93	15,62	15,1
2014	18,31	16,6	14,64	16,2
2015	20,59	18,6	16,97	19,5
2016	22,91	21,63	20,34	19,5
2017	21,95	21,64	18,87	18,5
2018	20,15	20,96	22,97	18,5
2019	21,52	23,28	23,31	19,7
2020	19,59	23,89	23,78	16,8
2021	24,27	19,6	25,34	19,7



PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2266/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/21/2/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 21/2/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Shinta Rahmadani
NPM : 1805180008
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset Ekonomi dan Bisnis

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Apakah Transformasi Digital Sistem dapat meningkatkan kinerja Bank BUMN di Indonesia

Rencana Judul : ① Pengaruh Transformasi Digital Sistem Terhadap Kinerja Bank BumN Di Indonesia
2. Pengaruh Dampak Adanya Tol Bagi Umkm Desa Bengkel Perbaungan
3. Peran Umkm Dalam Menyerap Tenaga Kerja Di Medan Barat Selama Pandemi

Objek/Lokasi Penelitian : Bank BumN Di Indonesia (Bank Konvensional)

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Shinta Rahmadani)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2266/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/21/2/2022

Nama Mahasiswa : Shinta Rahmadani
NPM : 1805180008
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset Ekonomi dan Bisnis
Tanggal Pengajuan Judul : 21/2/2022
Nama Dosen Pembimbing*) :
Prawidya H. Rs.
Judul Disetujui**) : Pengaruh Transformasi digital
sistem terhadap kinerja Bank
BUMN di Indonesia

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 21 Februari 2022

Dosen Pembimbing Un

(Dr. Prawidya H. Rs.)

Keterangan

*) Ditau oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditau oleh Dosen Pembimbing

Sebuah dokumen oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan upload kelembaran ke 2 mm pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567, Kode Pos Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA : SHINTA RAHMADANI
NPM : 1805180008
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
KONSENTRASI : RISET EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL PROPOSAL : PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL SISTEM TERHADAP KINERJA BANK BUMN DI INDONESIA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
8 maret 2022	Bab I : Bgk 4/ rumir dan hrs gelas pemukiman tgy lembaga perbankan termasuk ke Bank milik pmls		
22 april 2022	Bab I : Seluruhnya merupakan ringkasan dari LB milik, lembaga perbankan hrs tgy gelas, rumir dan tujuan pemukiman hrs sejalan, sh, lebih gelas tgy tujuan dan bpt rint		
19 mei 2022	Bab II : Tuor ho ngjwaha text book sh ngjwaha dan pemukiman terdapat dan struktur dga pemukiman yg diteliti meliputi gya dan kanya pemukiman.		
25 juli 2022	Bab III : Hrs tepat dga tujuan dan cara dan ngjwaha Model Ekon: dan Metode Ekon: 4/ metode ekon: dan Ekon: dr kanya DMP.		
2 Agustus 2022	Ujhaip. kya Bab III yg kya dga Bab I 4/ Mula dan kya msa		
4/8-2022	ACC II 4/ di Sminatan		

Pembimbing

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si

Medan,2022

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini Kamis, 04 Agustus 2022 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

Nama : Shinta Rahmadani
N.P.M. : 1805180008
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 29 Desember 1998
Alamat Rumah : Jl. Karya Setuju Gg. Aula
Judul Proposal : Pengaruh Transformasi Teknologi Digital Sistem Terhadap Kinerja Bank BUMN Di Indonesia

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I
Bab II	kerangka konseptual, perbaikan model bentuk.
Bab III	metode estimasi dan teknik pengujian
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Kamis, 04 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariani, S.E, M.Si

Pembanding

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 04 Agustus 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Shinta Rahmadani
N.P.M. : 1805180008
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 29 Desember 1998
Alamat Rumah : Jl. Karya Setuju Gg. Aula
JudulProposal : Pengaruh Transformasi Teknologi Digital Sistem Terhadap Kinerja Bank BUMN Di Indonesia

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menuliskan Skripsi dengan pembimbing : *Dr. Prawidya Hariani, S.E, M.Si*

Medan, Kamis, 04 Agustus 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Pembimbing

Dr. Prawidya Hariani, S.E, M.Si

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I

Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SHINTA RAHMADANI
 NPM : 1805180008
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
 Alamat Rumah : Jl. Karya Setuju Gg. Bilal/Aula
 Judul Skripsi : PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM TERHADAP KINERJA BANK BUMN DI INDONESIA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
4/8-2022	- Acc skripsi - Ambil data grup bank - ROA, LDR, NIM, BEPE CAR, Kestabilan bank; 10th.	[Signature]	
13/8-2022	- Bab IV - data bank - Deskripsi: Analisis kinerja bank - data bank Eksternal - Pertumbuhan bank	[Signature]	
27/8-22	- Perbaiki Analis data - Korelasi - kesimpulan	[Signature]	
6/9-2022	- Bab IV - ok - data bank - rasio keuangan - MPM - 10, 20th.	[Signature]	
14/9-2022	- Acc skripsi & sidang	[Signature]	

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Medan, 14 September 2022
 Diketahui / Disetujui
 An Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan

[Signature]
 Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

[Signature]
 Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



UMSU
Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/00/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2550 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Pada Tanggal : 8/29/2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Shinta Rahmadani
N P M : 1805180008
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Pembangunan
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Transformasi Teknologi Digital Sistem Terhadap Kinerja Bank BUMN Di Indonesia

Dosen Pembimbing : Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **29 Agustus 2023**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 Shafar 1444 H
29 Agustus 2022 M



Dekan

H. JANURI, SE.,MM.,M.Si.
NIDN:0109086502

Tembusan :
1. Peringgal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Shinta Rahmadani
NPM : 1805180008
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 29 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1 (Satu) dari 4 (empat) bersaudara
Alamat : Jl. Karya Setuju Gg. Bilal/Mesjid
No. Telepon : 0895608581816
Email : shintarahmadani656@gmail.com

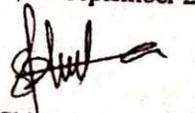
2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mairizal
Nama Ibu : Mulia Ningsih
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Karya Setuju Gg. Bilal/Mesjid

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2005-2011 : SDN 060849 Medan
2. Tahun 2011-2014 : SMPN 16 Medan
3. Tahun 2014-2017 : SMAN 12 Medan
4. Tahun 2018, Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 14 September 2022


(Shinta Rahmadani)